

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**



SKRIPSI

Oleh :

Emelia Yusria Putri

22312244

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
((Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia))**

SKRIPSI

Di susun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama: Emelia Yusria Putri

No Mahasiswa: 22312244

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 08 Mei 2026
Penulis,



Emelia Yusria Putri

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Emelia Yusria Putri

No Mahasiswa: 22312244

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 08 Mei 2026

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Arifin', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Prof Johan Arifin, S.E.,M.Si.,Ph.D.CfrA,CertIPSAS)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Variabel Moderasi

Disusun oleh : EMELIA YUSRIA PUTRI

Nomor Mahasiswa : 22312244

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 10 Juni 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah ayat 5.

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm ayat 6)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi'l'alaamiin, atas segala puji kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Selama studi dan menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan do'a dari berbagai pihak sehingga penulis diberikan kelancaran dalam proses menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Bapak Alwis dan Ibu Desmawita selaku Orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, do'a tiada henti serta dukungan kepada penulis selama menempuh studi hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFA, CFP, PSAS selaku dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selalu berusaha meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan yang berharga.
7. Keluarga penulis, Kakak kandung tersayang Febrianto Alwis, Aditya Kurniawan, dan Arif Rachman yang selalu memberikan dukungan, nasihat serta semangat kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat terbaik Penulis semasa perkuliahan yaitu Li'a Faiz Yusrotun, Putri Nurindah, Muhammad Fashan Ar-rifqi dan Rifqi Mirza Rahman. Untuk segala susah senang dan canda tawa yang dilalui bersama selama masa perkuliahan.
9. Pebrian Yoza Pratama atas dukungan dan pengertian yang tak terhingga yang selalu diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan teman-teman group seperbimbingan dibawah bimbingan Bapak Johan yang terus memberikan semangat satu sama lain dalam penyusunan skripsi.

11. Windah Basudara dan Podcast Keluarga Artis yang telah memberikan hiburan dan semangat melalui konten-konten yang dibuat selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran konten tersebut menjadi salah satu sarana bagi penulis untuk melepas penat dan menjaga motivasi dalam menyelesaikan penelitian hingga akhir.
12. And the last, kepada diri sendiri karena bertahan sejauh ini mengikuti perkuliahan dengan baik yang awalnya penuh dengan keraguan tetapi bisa untuk melewatinya dengan ketekunan dan kesabaran yang penuh tantangan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat kekayaan daerah, umur pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024 dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 256 data observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderating Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan umur pemerintah daerah tidak berpengaruh. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia terbukti memoderasi hubungan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan dengan arah negatif, namun tidak memoderasi variabel lainnya.

Kata kunci: kinerja keuangan, Tingkat kekayaan daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat, umur pemerintah daerah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Institusional	10
2.1.2 Teori Agensi	12
2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	13
2.1.4 Tingkat Kekayaan Daerah	14
2.1.5 Umur Pemerintah Daerah	15
2.1.6 Tingkat Ketergantungan pada Pusat	16
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Hipotesis Penelitian	22
2.3.1 Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	22
2.3.2 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	23
2.3.3 Pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	24

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia sebagai moderasi pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	25
2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia sebagai moderasi pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	27
2.3.6 Indeks Pembangunan Manusia sebagai moderasi pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	28
2.4 Kerangka Penelitian.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Populasi dan Sampel	32
3.1.1 Populasi.....	32
3.1.2 Sampel	32
3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data	33
3.2.1 Sumber Data	33
3.2.2 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.3 Definisi Operasional Variabel	34
3.3.1 Variabel Dependen	34
3.3.2 Variabel Independen.....	34
3.3.3 Variabel Moderasi.....	36
3.4 Metode Analisis Data	37
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	37
3.4.2 Uji F.....	37
3.4.3 Uji parsial (Uji t).....	38
3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi	38
3.4.5 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.6 Analisis Regresi Linear Berganda	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi data	42
4.2 Statistik Deskriptif (sebelum outlier)	43
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	44
4.3.1 Uji Normalitas.....	44
4.3.2 Uji Multikolinearitas.....	49

4.3.3 Uji Heterokedastisitas	50
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	51
4.4 Moderating Regression Analysis	52
4.4.1 Uji F (<i>Goodness of fit</i>)	54
4.4.2 Uji t	55
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi	57
4.5 Pembahasan	57
4.5.1 Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	57
4.5.2 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	59
4.5.3 Pengaruh Tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.....	61
4.5.4 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Moderasi Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	64
4.5.5 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Moderasi Pengaruh Umu pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah....	65
4.5.6 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Moderasi Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	67
BAB V KESIMPULAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Keterbatasan	71
5.3 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian	31
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Deskripsi data.....	42
Tabel 4.2 Deskripsi data statistik deskriptif (sebelum outlier)	43
Tabel 4.3 Hasil uji normalitas (sebelum outlier).....	45
Tabel 4.4 Hasil outlier dengan <i>casewise diagnostic</i>	45
Tabel 4.5 Hasil uji normalitas (setelah outlier).....	47
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif (setelah outlier)	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.10 Analisis regresi linier berganda.....	52
Tabel 4.11 Uji F	54
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi	57
Tabel 4.13 Hasil Uji MRA	57

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Seluruh Sample	77
LAMPIRAN 2 Perhitungan KK.....	84
LAMPIRAN 3 Perhitungan X1.....	95
LAMPIRAN 4 Perhitungan X2.....	106
LAMPIRAN 5 Perhitungan X3.....	113
LAMPIRAN 6 Perhitungan Z	125
LAMPIRAN 7 Statistik Deskriptif	132
LAMPIRAN 8 Uji Asumsi Klasik	132
LAMPIRAN 9 Analisis Regresi.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan masalah penting dalam penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi adalah upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kekuasaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga terbentuklah otonomi daerah pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan dan kerja pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola pembangunan dan menyediakan layanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Astuti *et al.*, 2022). Perbedaan hasil keuangan di antara daerah sangat besar, di mana beberapa daerah bisa mengelola uang dengan baik, sedangkan sebagian besar daerah lainnya masih menghadapi masalah utama dalam mengelola keuangan mereka.

Permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah berdampak luas terhadap pelayanan publik yang terhambat, otonomi daerah yang melemah akibat ketergantungan dana transfer, kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memburuk, serta pemborosan daya publik yang seharusnya mendukung program bermanfaat bagi masyarakat. Dengan meningkatkan wewenang yang dimiliki pemerintah daerah, masyarakat juga semakin berharap dan menuntut kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, perlu penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah salah satunya dilakukan melalui evaluasi kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat (Nugroho & Prasetyo, 2018). Proses ini tidak hanya melihat hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Jadi, kinerja keuangan bukan hanya dari anggaran yang terpakai, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan oleh publik. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik.

Pengukuran kinerja di pemerintah daerah sebelumnya dianggap hanya sebagai cara menunjukkan pencapaian program dan prestasi yang baik. Namun, ternyata ada tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu mendapatkan kekuasaan legitimasi politik dan institusional. Hal ini selaras dengan teori *institutional isomorphism* yang menjelaskan bahwa organisasi tidak hanya bersaing untuk sumber daya dan pelanggan, tetapi juga untuk institusi dan kekuasaan legitimasi politik agar menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi (Sofyani *et al.*, 2015).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah tingkat kekayaan daerah (Migang & Zahro, 2019). Tingkat kekayaan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kebutuhan dan mendanai pembangunannya sendiri, yang diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Afrian, 2016). Tingkat kekayaan daerah menunjukkan kapasitas fiskal suatu daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Selain tingkat kekayaan daerah, faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah umur pemerintah daerah. Indonesia mengalami penambahan pemerintah daerah yang terus meningkat. Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama maka akan berpengalaman dan lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan (Simbolon & Kurniawan, 2018). Banyak pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan kinerjanya di setiap masa periode yang berlangsung. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2016) dan Raihanul & Fitria (2023) menyatakan bahwa umur pemerintah daerah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah.

Hal lainnya yang mempengaruhi kinerja keuangan terdapat dari tingkat ketergantungan pada pusat yang dilihat dari penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) (Agintha, 2024). Pemerintah pusat secara rutin mentransfer dana bantuan pada daerah yang nantinya akan digunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Ketergantungan diukur dana transfer pusat terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi ($>70\%$) maka semakin rendah kemandirian fiskal. Pemerintah

daerah dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat rata-rata masih memiliki persentase yang sangat besar (Mappiasse, 2018). Dilansir dalam news.ddtc.co.id 30 April 2025, terdapat 88% pemerintah daerah bergantung pada transfer pusat, dengan 70% daerah dikategorikan sangat bergantung. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Fadhilla *et al.*, (2025) mengatakan bahwa di Kabupaten Magelang bergantung tinggi pada transfer pusat meski memiliki potensi PAD. Pada 2024, Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Magelang menunjukkan ketergantungan 137,38% yang artinya belanja melebihi pendapatan sendiri dan bergantung pada pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Alpi & Ramadhan (2018) mengatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Aziz & Kusumawati (2024) dan Agintha (2024) mengatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan tingginya PAD yang belum dimanfaatkan secara efisien tetapi lebih banyak digunakan untuk belanja rutin birokrasi. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Alpi & Ramadhan (2018), Aziz & Kusumawati (2024) dan Mappiasse (2018) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Migang & Zahro (2019) yang mengatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali terkait pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah

(TKD), Umur Pemerintah Daerah (UPD) dan Tingkat Ketergantungan pada Pusat (TKP) terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengujian apakah Indeks Pembangunan Manusia dapat memoderasi hubungan antara TKD, UPD dan TKP dengan kinerja keuangan.

Pada penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang dimana penelitian ini menggunakan beberapa jenis variabel dan variabel baru dengan data yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan teori dasar yang berbeda. Teori yang digunakan adalah teori Isomorfisme Institusional (*Isomorphism Institutional*), yang merupakan pengembangan dari teori Institusional. Teori institusional merupakan bagaimana suatu organisasi dibentuk oleh tekanan dari lingkungan sosial agar mendapatkan pengakuan dan bertahan hidup yang dimana memiliki tiga jenis Isomorfisme Institusional dengan karakteristik masing-masing, yaitu meliputi Isomorfisme Koersif, Isomorfisme Memetik, dan Isomorfisme Normatif. Penelitian ini lebih fokus pada penerapan Isomorfisme Koersif dan Isomorfisme Normatif. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
3. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ?
4. Apakah indeks pembangunan manusia dapat memoderasi hubungan tingkat kekayaan daerah dengan kinerja ?
5. Apakah indeks pembangunan manusia dapat memoderasi hubungan umur pemerintah daerah dengan kinerja keuangan ?
6. Apakah indeks pembangunan manusia dapat memoderasi hubungan tingkat ketergantungan pada pusat dengan kinerja keuangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji apakah pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indoensia.

2. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji apakah pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
4. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji apakah kekuatan Indeks Pembangunan Manusia dapat memoderasi hubungan antara Tingkat Kekayaan Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji apakah kekuatan Indeks Pembangunan Manusia dapat memoderasi hubungan antara Umur Pemerintah Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
6. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji apakah kekuatan Indeks Pembangunan Manusia dapat memoderasi hubungan antara Tingkat Ketergantungan dengan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan dan kinerja keuangannya secara efektif dan efisien. Terutama dalam pengambilan kebijakan dalam menyusun strategi

dan kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan daerah.

2. Dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana karakteristik pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan, sehingga berguna sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam pengambilan keputusan.
3. Penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara komprehensif.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu terkait karakteristik pemerintah daerah. Selain itu bab ini juga membahas hipotesis

sebagai dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya sehingga memberikan arah jelas untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode dan jenis penelitian yang digunakan serta populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi variabel dan metode analisis data yang menjadi objek penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengelolaan data serta pembahasan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran yang telah dilakukan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Institusional

Menurut Meyer dan Rowan dalam Wikke (2018), *Institutional Theory* (Teori Kelembagaan) didasari pada suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*). Menurut teori kelembagaan (*Institutional Theory*), organisasi yang lebih mengutamakan legitimasi cenderung berusaha menyesuaikan diri dengan harapan dari luar atau harapan sosial di lingkungan tempat organisasi tersebut berada. Teori institusional ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori institusional lama (*old institutionalism*) dan teori institusional baru (*new institutionalism*). Pada teori institusional lama ini berfokus pada kritik terhadap asumsi rasionalisme ekonomi neoklasik, menekankan pengaruh norma sosial, tradisi dan kekuasaan terhadap perilaku dan organisasi. Namun muncul teori institusional baru sejak 1970-an hingga 1980-an yang menekankan legitimasi dan isomorfisme (koersif, memetik dan normatif) yang membuat organisasi homogen untuk bertahan di lingkungan sosial.

2.1.1.1 Isomorfisme Institusional

Isomorfisme menurut DiMaggio dan Powell (1983) adalah proses di mana organisasi dalam suatu populasi untuk menyerupai satu sama lain karena tekanan dari lingkungan sekitarnya. Menurut Hawley (1968) isomorfisme proses yang memaksa satu unit dalam kelompok tertentu menyerupai unit

lainnya ketika mereka menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Ada dua jenis Isomorfisme, yaitu (1) *Competitive Isomorphism* (Isomorfisme Kompetitif) merupakan proses di mana organisasi berusaha menyesuaikan diri dengan persaingan di pasar serta kebutuhan akan rasionalitas agar tetap bertahan dan memperoleh keunggulan kompetitif sehingga mereka terdorong untuk berinovasi, beradaptasi dan melakukan strategis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi; dan (2) *Institutional Isomorphism* (Isomorfisme Institusional), yakni sebuah konsep yang membantu memahami cara kerja politik dan upacara dalam kehidupan modern, di mana sebuah organisasi saling berlomba bukan hanya mencari sumber daya dan pelanggan, tetapi juga mencari pengakuan sah akan kekuasaan politik dan institusi (DiMaggio & Powell, 1983).

Menurut DiMaggio & Powell (1983) mengidentifikasi isomorfisme dalam 3 tipe yaitu: (1) Isomorfisme koersif (*Coercive isomorphic*) hasil yang muncul karena tekanan dari kekuatan politik untuk mendapatkan pengakuan resmi bagi sebuah organisasi, (2) Isomorfisme memetik (*Mimetic isomorphic*) ketidakpastian yang ada lingkungan tempatnya beroperasi, sehingga organisasi untuk bereaksi, (3) Isomorfisme normatif (*Normative Isomorphic*), berkaitan dengan tekanan yang datang dari kelompok norma agar menerapkan praktik kelembagaan tertentu.

Menurut teori institusional, kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan cara pengelolaannya, tetapi juga oleh tekanan dari regulasi, cara kerja organisasi lain dan norma profesional

(isomorfisme institusional). Tekanan tersebut mendorong pemerintah daerah mengubah cara pengelolaan keuangan agar mendapatkan legitimasi, yang pada akhirnya bisa meningkatkan atau mengubah cara pengelolaan keuangan secara administratif.

2.1.2 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah karena adanya desentralisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dapat mengatur otonomi daerahnya masing-masing. Selain itu, teori agensi juga terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat ketergantungan pada pusat yang di mana pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*) menciptakan potensi kepentingan yang memengaruhi kinerja keuangan.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah (*agent*) memiliki tugas untuk mengelola keuangan daerah dengan baik demi masyarakat (*principal*). Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diberikan. Semakin baik kinerja keuangan, maka semakin kecil permasalahan keagenan yang terjadi, sedangkan kinerja keuangan yang buruk menunjukkan adanya masalah dalam hal kerja yang tidak efisien.

2.1.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kemampuan dan cara efektif suatu daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) dalam mengelola uang dan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan layanan dasar, membangun infrastruktur, serta mengendalikan defisit. Konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan dan manajemen keuangan yang baik, di mana penilaian dilakukan dengan menganalisis berbagai rasio, efisiensi, serta ketepatan dalam menjalankan anggaran. Di Indonesia, hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kinerja keuangan yang bagus menunjukkan pengelolaan uang yang hemat dan jujur. Hal ini berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena itu, mengukur dan meningkatkan kinerja keuangan menjadi hal yang penting dalam mengelola pemerintahan daerah. Penelitian juga menekankan pentingnya pengawasan melalui audit serta pengelolaan utang yang bijaksana untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan daerah secara keseluruhan (Afrian, 2016). Penelitian yang dilakukan Sari (2016) mengungkapkan bahwa kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja pada bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah, dengan penggunaan sistem

keuangan yang telah ditetapkan melalui kebijakan atau peraturan selama satu periode anggaran.

Rasio keuangan digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja keuangan dan juga menjadi salah satu cara untuk menganalisis bagaimana keuangan pemerintah daerah berjalan. Dalam penelitian ini, rasio efisiensi digunakan sebagai alat utama. Menurut Sartika (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi adalah perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan besar pendapatan yang berhasil diterima. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien pula kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.1.4 Tingkat Kekayaan Daerah

Menurut Nugroho & Muid (2014) tingkat kekayaan daerah adalah ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan dan operasional dengan menggali sumber pendapatan asli di wilayahnya sendiri. Konsep ini berfokus pada seberapa besar pendapatan asli daerah (PAD) yang berhasil didapatkan oleh pemerintah daerah melalui berbagai sumber seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lainnya yang sah. Semakin tinggi PAD, dianggap semakin tinggi tingkat kekayaan daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan layanan publik secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kekayaan daerah bisa dikatakan sebagai tekanan isomorfisme koersif karena daerah dengan tingkat kekayaan rendah (PAD kecil) cenderung lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menyebabkan mereka lebih patuh oleh tekanan koersif yaitu kewajiban mengikuti aturan, standar, dan kebijakan pemerintah pusat agar tetap memperoleh dukungan finansial dan legitimasi. Sebaliknya, daerah yang memiliki kekayaan tinggi (PAD besar) memiliki kemampuan keuangan yang lebih mandiri, sehingga posisi tawar mereka lebih kuat dalam merespons tekanan dari luar yang di mana lebih kritis, inovatif, dan fleksibel dalam mengikuti aturan dari pemerintah pusat.

2.1.5 Umur Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah adalah jumlah tahun sejak daerah tersebut dibuat secara resmi hingga tahun tertentu yang dilaporkan. Semakin lama umur administratif suatu daerah, maka diharapkan semakin tinggi pula pengalaman, kemampuan, dan kualitas pengelolaan keuangan, yang berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan serta informasi yang disampaikan ke publik oleh pemerintah daerah. Menurut Simbolon & Kurniawan (2018) umur pemerintah daerah yaitu seberapa lama pemerintah daerah tersebut telah berdiri atau beroperasi sejak didirikan berdasarkan Undang-Undang pembentukan masing-masing pemerintah daerah. Umur pemerintah daerah pada penelitian ini merupakan tekanan isomorfisme normatif dimana dengan umur pemerintah daerah yang lebih lama cenderung harus memiliki nilai kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik.

2.1.6 Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Qowi & Prabowo (2017) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat pemerintah merupakan seberapa besar sumber daya keuangan pemerintah daerah yang berasal dari bantuan atau transfer pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan ini ditunjukkan dari jumlah dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikirim ke pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Melalui dana yang telah diberikan, pemerintah pusat akan memonitor penggunaan DAU untuk memastikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan uang dengan lebih baik agar meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1.	Aziz & Kusumawati (2024)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Ukuran Pemerintah Daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, pertumbuhan ekonomi, dan temuan audit.	Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh pada kinerja keuangan. Tingkat kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2.	Parassela Pangestu Primadiva et al. (2021)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah,
3.	Setiani & Ismunawan (2022)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat ketergantungan	Tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
4.	Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Tingkat ketergantungan pada pusat, Kekayaan daerah (wealth/PAD), Belanja modal, Ukuran pemerintah	Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Tingkat ketergantungan pada pusat tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

		(size), Temuan audit, Leverage, Ukuran legislatif, Pendapatan pajak daerah	
5.	Mappiasse (2018)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, belanja daerah dan opini audit.	Tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, ukuran legislatif, dana perimbangan dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Migang & Zahro (2019)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan temuan audit.	Tingkat kekayaan daerah dan temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	Saraswati & Rioni (2019)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran pemerintah daerah dan <i>leverage</i> .	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
8.	Fitriyah (2016)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, <i>leverage</i> , status daerah, dan umur pemerintah daerah.	Belanja daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Status Daerah Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.

9.	Alfi & Sari (2023)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Leverage, jumlah penduduk dan umur pemerintah daerah.	<i>Leverage</i> dan umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
10.	Sunardi <i>et al</i> (2021)	Variabel dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen: Umur pemerintah daerah, Tingkat ketergantungan pada pusat, kemakmuran, belanja modal dan hasil pemeriksaan audit BPK.	Umur pemerintah daerah dan Tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Kemakmuran, belanja modal, dan hasil pemeriksaan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat kekayaan daerah diukur melalui besar PAD yang dimiliki, baik dalam bentuk nilai absolut maupun rasio terhadap keseluruhan pendapatan. Tingkat kekayaan ini mencerminkan kemakmuran dan kapasitas fiskal suatu daerah yang di mana semakin tinggi persentase PAD dalam struktur pendapatan, semakin kaya dan mandiri daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Qowi & Prabowo, 2017).

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menandakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan memberikan pelayanan publik tanpa bergantung pada dana transfer dari pusat (Saraswati & Rioni, 2019). Berdasarkan konsep isomorfisme koersif dari teori institusional, pemerintah pusat memberikan tekanan kepada pemerintah daerah agar mengelola kekayaan sesuai standar demi menjaga legitimasi dan keberlanjutan dukungan fiskal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni (2019) berkaitan dengan pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan dinyatakan terdapat pengaruh positif diantara kedua variabel tersebut. Hal ini bahwa tingkat kekayaan daerah itu memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Umur administratif pemerintahan daerah merupakan waktu sejak suatu daerah dibentuk berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama biasanya memiliki pengalaman dan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi dalam meningkatkan kinerja keuangannya. Pengalaman dan kemampuan yang diperoleh selama waktu tersebut menjadi modal penting dalam proses evaluasi periodik, yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan positif dan peningkatan kinerja.

Dari sudut pandang teori institusional, pemerintah daerah menghadapi tekanan normatif yang memengaruhi kinerjanya, yang kemudian menyebabkan perubahan pada struktur organisasi internal. Pemerintah daerah dengan umur lebih panjang memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena mengalami akumulasi tekanan normatif yang lebih lama sehingga terjadi profesionalisasi keuangan yang lebih matang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sunardi *et al* (2021) dan Alfi & Sari (2023) menyatakan bahwa umur administratif pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.3 Pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Tingkat ketergantungan pada pusat merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan yang keuangan yang tinggi dapat membuat pemerintah daerah menjadi lebih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan pemerintah akan kurang responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun jika tingkat ketergantungan yang rendah maka akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara finansial sehingga pemerintah daerah bisa leluasa dalam mengelola keuangannya bagi masyarakat. Tingkat ketergantungan pada pusat dapat dilihat dari membandingkan dana alokasi umum dengan total pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka semakin baik kinerja keuangannya. Penelitian terdahulu mendukung penelitian ini adalah penelitian oleh Migang & Zahro (2019) & Ismunawan (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia sebagai moderasi pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dalam pendidikan, kesehatan serta standar hidup layak. IPM juga memperhitungkan kesenjangan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat dengan IPM tinggi memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik, kesadaran yang lebih tinggi tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. IPM yang tinggi memperkuat mekanisme akuntabilitas karena masyarakat yang membayar pajak tinggi dan memiliki kapasitas pemahaman tinggi terhadap kualitas pengelolaan keuangan. Dari perspektif teori institusional, IPM tinggi dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan perspektif teori institusional menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia yang baik dalam suatu institusi akan menghasilkan praktik tata kelola institusi yang baik juga. Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi akan cenderung menunjukkan tingkat pendidikan dan kesadaran publik yang baik,

serta dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pemerintahan yang lebih baik di suatu daerah. Dalam kondisi ini pemerintah daerah harus dapat terdorong untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik agar dapat memenuhi standar tata kelola yang baik dan tuntutan masyarakat dengan secara baik. Penelitian oleh Rakhman dan Wijayana (2024) menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki kaitan dengan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintahan daerah. Pada hal tersebut menyebutkan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi akan cenderung menghasilkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah yang baik juga.

Penelitian lain oleh Nisa dan Tripriyono (2025) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian Nisa dan Tripriyono (2025) mengungkapkan bahwa IPM dijadikan sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pada kinerja keuangan pemerintahan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang baik dapat memengaruhi hubungan antara kapasitas fiskal dan kinerja keuangan pemerintahan daerah. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Indeks pembangunan manusia memperkuat pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.5 Indeks Pembangunan Manusia sebagai moderasi pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pemerintah daerah yang lebih tua memberikan keunggulan dalam bentuk kematangan lembaga dan sistem yang sudah mapan. Pemerintahan daerah yang memiliki umur lebih lama umumnya akan memiliki pengalaman yang lebih luas dalam hal pengelolaan anggaran, menyusun kebijakan publik, serta dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Pengalaman yang lebih luas tersebut dapat memungkinkan pemerintahan daerah untuk memiliki memori yang lebih luas, praktik pengelolaan yang lebih efisien, dan kapasitas birokrasi yang lebih matang, sehingga hal tersebut dapat memungkinkan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintahan daerah yang lebih terstruktur, efisien, dan teratur.

Selain itu, keberhasilan ini dapat dicapai juga jika terdapat sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut dan menerapkan pengetahuan institusional yang telah terkumpul. IPM yang tinggi mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang baik. Di daerah yang berkembang dengan IPM tinggi, pegawai cenderung lebih berpendidikan, lebih terlatih dan lebih profesional. Mereka mampu memanfaatkan memori institusional dan praktik terbaik yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Tingginya IPM menunjukkan masyarakat dan aparturnya pada tingkatan pendidikan, kesehatan, dan kapasitas produktivitas yang baik.

Penelitian terdahulu oleh Setiawan et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkatan IPM memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan daerah. Pada penelitian Setiawan et al. (2023) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan manusia akan memengaruhi kinerja pemerintahan daerah yang lebih baik pula dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah dan dalam melakukan pelayanan publik. Selain itu, penelitian lain oleh Satriawan et al. (2021) mengungkapkan bahwa peningkatan dari kapasitas fiskal dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan peningkatan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapatnya hubungan antara sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang begitu erat. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang diungkapkan, pada penelitian ini merumuskan hipotesis lain, yaitu berupa:

H₅ : Indeks pembangunan manusia memperkuat pengaruh umur pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.6 Indeks Pembangunan Manusia sebagai moderasi pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Ketergantungan pemerintahan daerah dalam hal pendanaan dari pemerintah pusat merupakan fenomena yang umum pada pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari transfer dana pusat ke pemerintahan daerah menjadi sumber pendanaan yang penting bagi daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan segala macam kegiatan pemerintahan daerah.

Ketergantungan yang tinggi dari pemerintahan daerah pada pendanaan yang diberikan oleh pusat mencerminkan akan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini memberikan dampak pada kinerja dari keuangan daerah, terutama dalam hal pengelolaan dan transfer jika tidak dilakukan dengan efektif dan efisien (Arief, 2025).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2025) menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah akan transfer dana dari pemerintah pusat memiliki kecenderungan yang berkorelasi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang rendah. Hal ini menunjukkan pula bahwa pemerintahan daerah yang terlalu bergantung pusat akan menjadikan pada perimbangan dana yang menyebabkan kurangnya insentif pemerintahan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan melalui optimalisasi PAD. Akibatnya, pemerintahan daerah akan mengalami penurunan atau tidak berkembangnya kinerja dalam pengelolaan keuangan dan anggaran yang tidak efisien. Putri et al. (2025) mengatakan bahwa transfer dana dari pusat memiliki pengaruh signifikan yang mengarah negatif terhadap kinerja keuangan dari pemerintahan daerah, karena adanya ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah pada transfer dana dari pusat. Oleh karena itu, suatu daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat, namun memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik secara tidak langsung akan tetap bisa mendorong pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan

kinerja keuangan yang diberikan dengan secara optimal melalui pengawasan sosial dan partisipasi publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Braian dan Indarti (2025) mengungkapkan bahwa kualitas IPM memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan pada pemerintahan daerah. Braian dan Indarti (2025) menemukan adanya peningkatan kualitas manusia yang dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Selain itu penelitian lain dari Prayuda dan Arifin (2024) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki tingkatan pendidikan dan kesejahteraan yang tinggi akan cenderung untuk dapat bekerja lebih produktif, serta memiliki kesadaran yang besar pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, pada penelitian ini terdapat hipotesis yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

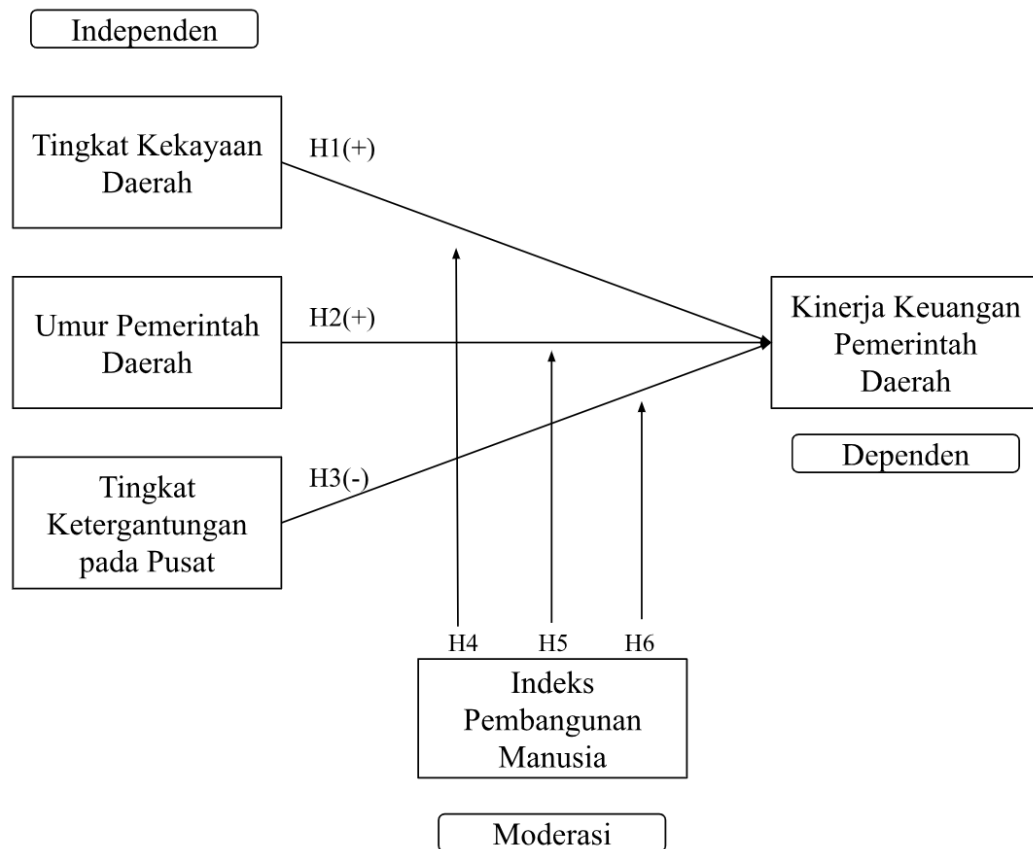
H6 : Indeks pembangunan manusia memperkuat pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori isomorfisme institusional dan teori agensi untuk memproyeksi bagaimana kinerja keuangan suatu pemerintah daerah di Indonesia. Terdapat tiga bentuk rinci dalam teori institutional isomorphism yaitu isomorfisme koersif, isomorfisme memetik, dan isomorfisme normatif, yang pada penelitian ini hanya menggunakan dua yaitu isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif. Tekanan isomorfisme koersif pada penelitian ini adalah tingkat kekayaan

daerah sedangkan isomorfisme normatif yaitu umur pemerintah daerah. Kemudian untuk teori agensi yaitu tingkat ketergantungan pada pusat.

Model pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah area generalisasi yang mencakup semua objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang sudah ditentukan oleh dipelajari dan dari situ diambil kesimpulan dari peneliti (Sekaran & Bougie, 2016). Melalui data Kementerian Dalam Negeri Indonesia tahun 2020 total populasi kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia adalah sebanyak 514 kabupaten/kota. Pada penelitian ini menggunakan tahun 2022-2024 karena mencerminkan kondisi terbaru pengelolaan keuangan daerah, sehingga hasil penelitian lebih relevan dan akurat dalam menggambarkan situasi saat ini.

3.1.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan penilaian peneliti sendiri untuk memilih anggota populasi yang dianggap relevan dan memenuhi kriteria tertentu guna berpartisipasi dalam penelitian. Karakteristik penilaian sampel yang dibutuhkan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menyajikan informasi melalui Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024 yang dapat diakses oleh peneliti.

3.2 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain atau media perantara. Sumber tersebut meliputi situs resmi organisasi, instansi, pemerintah daerah, publikasi, sumber dari internet, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dokumen yang menjadi bahan penelitian mencakup laporan keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2022-2024.

3.2.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data berfungsi untuk mendapatkan berbagai informasi yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode dokumentasi dan sumber lain. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen, arsip, buku, data numerik, gambar, serta informasi lain yang mendukung jalannya penelitian (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan meliputi laporan keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bahan penelitian.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Menurut Yusuf (2016) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (terikat) pada penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keberhasilan suatu pemerintah daerah tercermin dari tercapainya kinerja keuangan yang baik dengan mengikuti peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat dilakukan dengan merujuk pada analisis rasio efisiensi keuangan daerah sebagai indikator utama pencapaian kinerja tersebut.

Rasio efisiensi pengelolaan keuangan menunjukkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu periode tertentu yang digunakan untuk menilai seberapa efisiensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya seberapa besar biaya atau belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Rumus untuk menghitung rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan karena adanya variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) pada penelitian ini meliputi tingkat

kekayaan daerah, belanja daerah, umur pemerintah daerah, leverage dan temuan audit BPK.

3.3.2.1 Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan daerah merupakan indikator yang penting untuk menilai kesehatan fiskal dan kemandirian keuangan pemerintah yang dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang dihasilkan pemerintah daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut Noviyanti & Kiswanto (2016) tingkat kekayaan daerah dipandang sebagai ukuran kapasitas daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Maka pada penelitian ini diukur dengan rumus:

$$\text{Tingkat kekayaan daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

3.3.2.3 Umur Pemerintah Daerah

Umur administratif pemerintah daerah adalah durasi waktu sejak pemerintah daerah tersebut dibentuk berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Pemerintah daerah yang berusia administratif lebih lama cenderung memiliki pengalaman dan kemampuan profesional yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja keuangan mereka. Semakin lama usia pemerintah daerah, semakin banyak pengalaman dan keahlian yang mereka miliki dalam proses evaluasi akhir periode, sehingga dapat menciptakan perubahan dan peningkatan yang nyata. Penilaian terhadap umur pemerintah daerah dilakukan dengan menghitung selama berapa lama

pemerintah daerah tersebut telah ada berdasarkan aturan administratif yang berlaku.

3.3.2.4 Tingkat Ketergantungan pada Pusat

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah merupakan besaran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dilihat di penerimaan Dana Alokasi Umum atau DAU. Semakin rendah dana alokasi umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka semakin mandiri pula pemerintah tersebut dalam membiayai programnya. Tingkat ketergantungan daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$TKPP = \frac{\text{Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3.3.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang memiliki pengaruh terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.3.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah ukuran menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan di suatu wilayah melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup manusia yang memberikan gambaran kesejahteraan dan potensi produktivitas masyarakat. Pengukuran

indeks pembangunan manusia akan dilakukan dengan meninjau nilai IPM yang berbeda pada setiap pemerintah daerah.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik ini membantu dalam mengetahui karakteristik dari suatu data, seperti rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar, dan tingkat penyebaran data melalui standar deviasi.

3.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2018), Uji F atau sering disebut juga sebagai uji kelayakan model (*Goodness of Fit test*) adalah suatu uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah model regresi secara keseluruhan layak digunakan sebagai alat prediksi. Pengujian uji F dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansinya yang diperoleh dengan tingkat signifikansi pada level $\alpha = 0,05$. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

- a. Bila nilai probabilitas < nilai signifikansi ($\text{sig} < 0,05$) maka model regresi dinyatakan fit. (layak) untuk digunakan.
- b. Bila nilai probabilitas > nilai signifikansi ($\text{sig} > 0,05$), maka model regresi dinyatakan tidak fit (layak) untuk digunakan.

3.4.3 Uji parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji T dalam penelitian digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan perbedaan pada variabel dependen secara sendiri-sendiri (Ghozali, 2018). Jika variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, maka nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Artinya, variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabilitas atau perubahan variabel dependen oleh variabel independen. Koefisien ini biasanya dilambangkan dengan R^2 dan nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, semakin besar proporsi variabilitas variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut. Sebaliknya, jika mendekati 0, maka variabel independen kurang mampu menjelaskan perubahan variabel dependen.

3.4.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menghilangkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi, sehingga hasil yang didapat lebih tepat

dan mendekati kebenaran. Uji asumsi klasik mencakup beberapa tes seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi (Diamonalisa *et al.*, 2022).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau sisaan (residual) memiliki distribusi normal. Model regresi dianggap bagus jika datanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Analisis statistik sering digunakan untuk menguji normalitas sisaan, seperti uji non-parameter K-S (Kolmogorov-Smirnov). Jika nilai probabilitas signifikan atau lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikan atau lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Jika terdapat korelasi yang sangat kuat antara variabel bebas, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan terganggu. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variation Inflation Factor). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka model dianggap bebas dari masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengecek apakah terdapat perbedaan dalam varians dari residual pada model regresi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Jika varians dari residual tetap sama di setiap pengamatan, maka disebut homoskedastisitas, namun jika variansnya berubah-ubah, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau dalam kondisi homoskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam penelitian, dapat menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Uji Glejser menyarankan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika hasil uji Glejser menunjukkan koefisien parameter beta lebih besar dari 0.05, maka dapat dipastikan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi diantara anggota atau data observasi yang terletak berderetan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
2. Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada terautokorelasi
3. Jika DW di atas +2 berarti ada autokorelasi positif

3.4.6 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1TKD + \beta_2UPD + \beta_3TKPP + \beta_4TKD*IPM + \beta_5UPD*IPM + \beta_6TKPP*IPM + e$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α = Nilai Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$ = Koefisien regresi

TKD = Tingkat kekayaan daerah

UPD = Belanja daerah

TKPP = Umur pemerintah daerah

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

e = Error

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain atau media perantara. Sumber tersebut meliputi situs resmi organisasi, instansi, pemerintah daerah, publikasi, sumber dari internet, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dokumen yang menjadi bahan penelitian mencakup laporan keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2022-2024.

Tabel 4.1 Deskripsi data

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah		
		2022	2023	2024
1.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.	514	514	514
2.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tidak dapat diakses oleh peneliti. melalui Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022-2024.	415	415	418
3.	Jumlah data observasi	99	99	96
4.	Jumlah Outlier	19	10	9
5.	Jumlah data obeservasi	80	89	87
	JUMLAH	256		

Sumber: data diolah oleh penulis, 2026

4.2 Statistik Deskriptif (sebelum outlier)

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif menampilkan nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi data statistik deskriptif (sebelum outlier)

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	294	.75	1.38	1.0081	.05723
TKD	294	.00	.87	.1640	.14231
UPD	294	7	78	44.82	25.543
TKPP	294	.13	1.00	.8268	.14069
Valid N (listwise)	294				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah (KK) memiliki nilai minimum sebesar 0,75 dan nilai maksimum sebesar 1,38, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 1,0081 serta standar deviasi sebesar 0,05723. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data Kinerja Keuangan relatif kecil dan cenderung stabil.

2. Tingkat Kekayaan Daerah (X1)

Variabel Tingkat Kekayaan Daerah (TKD) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 0,87, dengan nilai rata-rata sebesar

0,1640 serta standar deviasi sebesar 0,14231. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam tingkat ketergantungan daerah antar sampel.

3. Umur Pemerintah Daerah (X2)

Variabel Umur Pemerintah Daerah (UPD) memiliki nilai minimum sebesar 7 dan maksimum sebesar 78, dengan nilai rata-rata sebesar 44,82 serta standar deviasi sebesar 25,543. Nilai ini menunjukkan bahwa UPD memiliki rentang data yang cukup lebar dan variasi yang tinggi.

4. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (X3)

Variabel Tingkat Ketergantungan pada Pusat (TKPP) memiliki nilai minimum sebesar 0,13 dan maksimum sebesar 1,00, dengan nilai rata-rata sebesar 0,8268 serta standar deviasi sebesar 0,14069. Hal ini menunjukkan bahwa variasi data TKPP relatif sedang dan tidak terlalu menyebar.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen, maupun keduanya memiliki distribusi data secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang distribusi datanya normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan menggunakan metode uji

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil uji normalitas (sebelum outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
n			294
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.05588929	
Most Extreme Differences	Absolute	.118	
	Positive	.118	
	Negative	-.100	
Test Statistic			.118
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.000
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.000	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.000
		Upper Bound	.000

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Hasil uji normalitas terhadap 294 data dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig (2-tailed)*) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Permasalahan ini dapat diatasi dengan mengidentifikasi *outlier* pada data yang memiliki nilai ekstrem yang dapat memengaruhi distribusi data. Identifikasi *outlier* dilakukan melalui analisis *casewise diagnostics* (Ghozali, 2018). Hasil analisis *outlier* menunjukkan bahwa 38 data perlu dihapus sehingga tersisa 256 data yang selanjutnya dilakukan uji normalitas kembali. Adapun rincian data yang dihapus menggunakan analisis *casewise diagnostics* sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil outlier dengan *casewise diagnostic*

No	Wilayah	Tahun
1	Kab. Kuningan	2022
2	Kab. Bengkayang	2022
3	Kab. Kolaka Timur	2022

4	Kab. Badung	2022
5	Kab. Sumbawa Barat	2022
6	Kota Ambon	2022
7	Kab. Konawe Selatan	2023
8	Kab. Buton Selatan	2022
9	Kab. Buton Utara	2023
10	Kab. Gianyar	2024
11	Kab. Buton Utara	2023
12	Kab. Sumbawa Barat	2023
13	Kab. Siak	2022
14	Kab. Muna Barat	2022
15	Kab. Kepulauan Tanimbar	2022
16	Kota Bau-bau	2022
17	Kota Singkawang	2022
18	Kota Kendari	2022
19	Kab. Bangli	2022
20	Kab. Maluku Barat Daya	2022
21	Kab. Muna Barat	2023
22	Kab. Indragiri Hulu	2023
23	Kab. Kuantan Singingi	2024
24	Kab. Siak	2024
25	Kab. Rokan Hilir	2022
26	Kota Dumai	2022
27	Kab. Lombok Timur	2022
28	Kab. Seram Bagian Barat	2023
29	Kota Denpasar	2024
30	Kab. Lombok Barat	2024
31	Kab. Kubu Raya	2023
32	Kab. Konawe Kepulauan	2023
33	Kab. Pegunungan Arfak	2024
34	Kota Bima	2022
35	Kab. Maluku Tenggara	2023
36	Kab. Sumbawa Barat	2024
37	Kab. Lombok Utara	2024
38	Kab. Kaimana	2024

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Setelah dilakukan analisis casewise diagnostic, maka, hasil dari pengujian normalitas setelah dilakukan *outlier* disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Hasil uji normalitas (setelah outlier)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
n			256
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.02870835
Most Extreme Differences	Absolute		.045
	Positive		.023
	Negative		-.045
Test Statistic			.045
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.230
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.219
		Upper Bound	.241

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa setelah penghapusan *outlier*, tersisa 256 data dalam penelitian ini. Hasil uji normalitas yang dilakukan kembali menggunakan uji statistik nonparametrik *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menghasilkan nilai signifikansi (*Asymp. Sig (2-tailed)*) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$) yang mengindikasikan bahwa data yang digunakan telah terdistribusi normal.

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif (setelah outlier)

Descriptive Statistics					
	n	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	256	.93	1.08	1.0046	.02968
TKD	256	.02	.87	.1876	.17178
UPD	256	15	78	49.72	21.880
TKPP	256	.13	1.01	.8251	.13503
Valid N (listwise)	256				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dijelaskan hasil statistik deskriptif setelah outlier untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)

Variabel Kinerja Keuangan (KK) memiliki nilai minimum sebesar 0,93 dan maksimum sebesar 1,08, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 1,0046 serta standar deviasi sebesar 0,02968. Hal ini menunjukkan bahwa data KK relatif homogen karena penyebaran datanya kecil.

2. Variabel Tingkat Kekayaan Daerah (TKD) memiliki nilai minimum sebesar 0,02 dan maksimum sebesar 0,87, dengan rata-rata sebesar 0,1876 dan standar deviasi sebesar 0,17178. Nilai standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa data TKD memiliki variasi yang cukup tinggi.

3. Umur Pemerintah Daerah (X2)

Variabel Umur Pemerintah Daerah (UPD) memiliki nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 78, dengan nilai rata-rata sebesar 49,72 serta standar deviasi sebesar 21,880. Hal ini menunjukkan bahwa variabel UPD memiliki penyebaran data yang cukup luas.

4. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (X3)

Variabel Tingkat Ketergantungan Pada Pusat (TKPP) memiliki nilai minimum sebesar 0,13 dan maksimum sebesar 1,01, dengan nilai rata-rata sebesar 0,8251 dan standar deviasi sebesar 0,13503. Variabel ini menunjukkan tingkat variasi data yang sedang.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi yang kuat antar variabel independennya. Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas penelitian ini menggunakan nilai *Tolerance* dan *Variance inflation factor* (VIF). Model regresi yang terbatas dari masalah multikolonearitas, yaitu apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 (Ghozali, 2018).

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		
		B	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.078		
	TKD	-.053	.561	1.782
	UPD	.000	.849	1.178
	TKPP	-.070	.500	2.001

a. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Tabel 4.7 menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* yang $> 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 . Variabel TKD memiliki nilai *Tolerance* sebesar -0,053 dan VIF sebesar 1,782. variabel UPD memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,849 dan VIF sebesar 1.178, serta variabel TKPP memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,500 dan VIF sebesar 2,001. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, sehingga model dinyatakan memenuhi asumsi bebas multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual pada berbagai tingkat nilai variabel independen. Jika *variance* residual tidak konsisten (heteroskedastisitas), maka model regresi menjadi tidak efisien. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk menguji terjadinya heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan absolut residual dari model regresi. Jika nilai signifikansi untuk variabel independen lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.015	.012		1.239	.216
	TKD	.008	.009	.075	.907	.365
	UPD	-9.933E-5	.000	-.120	-1.780	.076
	TKPP	.013	.012	.097	1.106	.270

a. Dependent Variable: ABSRES1

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Dari hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glesjer, *output* menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolut residual yaitu ditunjukkan dengan Sig. di setiap variabel independen lebih besar dari 0,05 yang artinya model ini terbebas dari heterokedastisitas.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara kesalahan (*error*) pada periode t dan kesalahan pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam model regresi linear. Autokorelasi biasanya terjadi pada data *time series*. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Salah satu metode yang digunakan untuk pengujian ini adalah Durbin-Watson *Test* (*DW Test*). Nilai DW yang menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi harus memenuhi syarat $dU < DW < 4-dU$. Dari hasil uji yang dilakukan menghasilkan *output* sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.253 ^a	.064	.053	.02888	2.048

a. Predictors: (Constant), TKPP, UPD, TKD

b. Dependent Variable: KK

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson dengan jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel ($k = 3$) dan jumlah sampel sebesar 256 ($n = 256$), diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,048. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas (dU) sebesar 1,81226 dan nilai ($4 - dU$) sebesar 2,18774. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada pada rentang $1,81226 < 2,048 < 2,18774$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengalami autokorelasi.

4.4 Moderating Regression Analysis

Berikut ini adalah hasil dari uji *moderating regression analysis* (MRA)

Tabel 4.10 Hasil Uji MRA

Coefficients ^a							Keterangan
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1.211	.036		33.249	.000	
	TKD	.380	.129	2.198	2.946	.004	Didukung
	UPD	-.001	.001	-.644	-.844	.399	Tidak Didukung
	TKPP	-.163	.064	-.743	-2.532	.012	Didukung
	TKDxIPM	-.007	.002	-2.981	-3.417	.001	Tidak Didukung
	UPDxIPM	9.489E-6	.000	.534	.662	.508	Tidak Didukung
	TKPPxIPM	-.001	.001	-.166	-.751	.454	Tidak Didukung
a. Dependent Variable: KK							

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.10, diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$Y = 1,211 + 0,380 \text{ TKD} - 0,001 \text{ UPD} - 0,163 \text{ TKPP} - 0,007 (\text{TKD} \times \text{IPM}) + 9,489\text{E-}6 (\text{UPD} \times \text{IPM}) - 0,001 (\text{TKPP} \times \text{IPM})$$

Dari persamaan *Moderating Regression Analysis* diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (*constant*) sebesar 1,211 menunjukkan bahwa apabila variabel TKD, UPD, TKPP, serta variabel moderasi bernilai nol, maka nilai Kinerja Keuangan Daerah adalah sebesar 1,211.
2. Koefisien regresi variabel TKD bernilai 0,380 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara TKD dan kinerja keuangan daerah adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada TKD akan

meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,380 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien regresi variabel UPD bernilai -0,001 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara UPD dan kinerja keuangan daerah adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada UPD akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien regresi variabel TKPP bernilai -0,163 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara TKPP dan kinerja keuangan daerah adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada TKPP akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,163 dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Koefisien regresi variabel interaksi TKD×IPM bernilai -0,007 yang menunjukkan bahwa variabel IPM memperlemah hubungan antara TKD terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan interaksi antara TKD dan IPM akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,007 dengan asumsi variabel lain konstan.
6. Koefisien regresi variabel interaksi UPD×IPM bernilai 9,489E-6 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara UPD×IPM dan kinerja keuangan daerah adalah positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan interaksi antara UPD dan IPM akan meningkatkan kinerja keuangan daerah sebesar 9,489E-6 dengan asumsi variabel lain konstan.

7. Koefisien regresi variabel interaksi TKPP×IPM bernilai -0,001 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara TKPP×IPM dan kinerja keuangan daerah adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan interaksi antara TKPP dan IPM akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 0,001 dengan asumsi variabel lain konstan.

4.4.1 Uji F (*Goodness of fit*)

Uji signifikansi keseluruhan dari regresi sampel digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi fit atau tidak fit. Dengan ketentuan signifikansi kurang dari 0,05 ($<0,05$). Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.034	7	.005	6.396	.000 ^b
	Residual	.190	248	.001		
	Total	.225	255			
a. Dependent Variable: KK						
b. Predictors: (Constant), TKPPxIPM, UPD, IPM, TKD, UPDxIPM, TKPP, TKDxIPM						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Model regresi menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang bernilai kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi fit atau layak digunakan.

4.4.2 Uji t

Uji signifikansi parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan uji t pada derajat keyakinan sebagai 95% atau $\alpha = 5\%$ dengan ketentuan apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak didukung dan H_a didukung, sedangkan apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 didukung dan H_a tidak didukung.

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Variabel TKD memiliki nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa TKD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Koefisien regresi bernilai positif 0.380, sehingga dapat disimpulkan bahwa TKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah **Didukung**
2. Umur pemerintah daerah (UPD) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,399 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa UPD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) **Tidak didukung**.
3. Variabel Tingkat ketergantungan pada pusat memiliki nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar -0.163. Hal

ini menunjukkan bahwa TKPP berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Koefisien regresi bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa TKPP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Maka Hipotesis (H_3) yang menyatakan Tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah **Didukung**

4. Variabel interaksi **TKD×IPM** memiliki nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa IPM mampu memoderasi hubungan antara TKD terhadap Kinerja Keuangan. Koefisien bernilai negatif, sehingga IPM memperlemah pengaruh TKD terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis (H_4) yang menyatakan Indeks pembangunan manusia memperkuat pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah **Tidak didukung**
5. Variabel interaksi **UPD×IPM** memiliki nilai signifikansi sebesar $0,508 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tidak mampu memperkuat hubungan antara UPD terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis kelima (H_5) **Tidak didukung**
6. Variabel interaksi **TKPP×IPM** memiliki nilai signifikansi sebesar $0,454 > 0$. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tidak mampu memperkuat hubungan antara TKPP terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis keenam (H_6) **Tidak didukung**.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2):

Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.391 ^a	.153	.129	.027697	2.019
a. Predictors: (Constant), TKPPxIPM, UPD, IPM, TKD, UPDxIPM, TKPP, TKDxIPM					
b. Dependent Variable: KK					

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat nilai koefisien determinasi (R) sebesar 0.129 atau 12.9%, artinya variabel independen memengaruhi variabel dependen sebesar 12.9% dan sisanya sebesar 87,1% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel tingkat kekayaan daerah (TKD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,380 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dinyatakan didukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah yang diproksikan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingginya PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang baik cenderung lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran, meningkatkan pelayanan publik, serta menjalankan program pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori institusional, khususnya konsep isomorfisme koersif, pemerintah daerah mendapatkan tekanan dari pemerintah pusat untuk mengelola keuangan daerah secara baik, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah dengan tingkat kekayaan yang tinggi memiliki kemampuan lebih besar dalam memenuhi standar pengelolaan keuangan yang ditetapkan sehingga mampu memperoleh legitimasi yang baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat. Selain itu, daerah yang kaya secara fiskal juga cenderung memiliki sumber daya dan kapasitas administratif yang lebih memadai dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saraswati dan Rioni (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Penelitian Nugraheni dan Adi (2020) serta Migang dan Zahro (2019) juga menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kekayaan daerah merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin baik pula kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, efektif, dan akuntabel.

4.5.2 Pengaruh umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ditolak.

Hasil ini menunjukkan bahwa lamanya suatu pemerintah daerah berdiri tidak secara otomatis membuat daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Secara empiris, pengalaman administratif yang lebih panjang ternyata belum cukup menjadi faktor penentu efisiensi

dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya, pemerintah daerah yang lebih tua tidak selalu lebih unggul dibandingkan daerah yang relatif lebih muda dalam hal pengelolaan keuangan.

Jika dilihat dari teori institusional, khususnya *isomorfisme normatif*, pemerintah daerah yang lebih lama berdiri seharusnya memiliki sistem birokrasi yang lebih mapan, pengalaman yang lebih panjang, dan tingkat profesionalisme yang lebih tinggi. Dalam kerangka teori, umur administratif yang lebih panjang seharusnya mencerminkan akumulasi pengetahuan organisasi dan kematangan kelembagaan yang dapat mendorong perbaikan kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak selalu terjadi dalam praktik.

Tidak signifikannya pengaruh umur pemerintah daerah dapat diartikan bahwa faktor pengalaman kelembagaan belum tentu diikuti oleh inovasi, efisiensi, dan kemampuan adaptasi terhadap tuntutan tata kelola keuangan modern. Pemerintah daerah yang telah lama berdiri mungkin memang memiliki pengalaman lebih banyak, tetapi apabila pengalaman tersebut tidak dibarengi dengan pembaruan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan pengawasan internal, maka pengalaman administratif tersebut tidak cukup untuk menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Fitriyah (2016), Sunardi et al. (2021), dan Alfi dan Sari (2023) yang menemukan bahwa umur

pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024, umur pemerintah daerah belum menjadi faktor yang cukup kuat untuk menjelaskan variasi kinerja keuangan.

Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan lingkungan tata kelola pemerintahan yang semakin terdigitalisasi dan terstandarisasi. Saat ini, baik daerah yang lama maupun yang relatif baru sama-sama berada dalam kerangka regulasi nasional yang seragam, diawasi oleh institusi yang sama, serta menggunakan sistem pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi. Kondisi ini dapat mengurangi pengaruh umur administratif sebagai pembeda utama dalam kualitas kinerja keuangan.

4.5.3 Pengaruh Tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah didukung

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil

ini konsisten dengan logika desentralisasi fiskal, di mana daerah yang terlalu bergantung pada transfer pusat cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan kurang terdorong untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri.

Dalam perspektif teori agensi, hasil ini dapat dijelaskan melalui hubungan antara pemerintah pusat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Ketika pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat, maka ruang fiskal daerah menjadi sangat dipengaruhi oleh keputusan pusat. Kondisi ini dapat menimbulkan perilaku oportunistik atau setidaknya menurunkan insentif daerah untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah mungkin menjadi lebih fokus pada penyerapan anggaran daripada optimalisasi hasil pengelolaan keuangan itu sendiri.

Selain itu, tingkat ketergantungan yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa daerah belum mampu menggali potensi ekonominya secara optimal melalui PAD. Ketidakmampuan ini pada akhirnya memengaruhi fleksibilitas fiskal daerah dalam menyusun prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pusat, maka daerah cenderung berada pada posisi yang kurang mandiri, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kebijakan fiskalnya.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui pendekatan isomorfisme koersif dalam teori institusional. Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada pusat berada dalam tekanan regulatif yang lebih kuat untuk menyesuaikan praktik pengelolaan keuangan sesuai ketentuan pusat. Namun, tekanan ini tidak selalu menghasilkan efisiensi. Dalam beberapa kasus, kepatuhan formal terhadap aturan justru lebih dominan daripada upaya substantif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini mendukung penelitian Migang dan Zahro (2019) serta Setiani dan Ismunawan (2022) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini juga sejalan dengan uraian dalam latar belakang penelitian bahwa masih banyak pemerintah daerah di Indonesia yang sangat bergantung pada transfer pusat, sehingga kemandirian fiskalnya rendah.

Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Aziz dan Kusumawati (2024), Noviyanti, dan Mappiasse (2018) yang menemukan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan tersebut dapat dipahami karena dana transfer dari pusat pada dasarnya juga dapat membantu daerah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Akan tetapi, dalam penelitian ini, hasil negatif menunjukkan bahwa dominasi

dana transfer justru lebih mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal daripada dukungan terhadap efisiensi keuangan.

4.5.4 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Moderasi Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperkuat pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa IPM justru memperlemah hubungan tersebut, sehingga hipotesis yang diajukan tidak didukung secara empiris.

Secara teoritis, berdasarkan teori institusional, IPM yang tinggi seharusnya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui tekanan normatif dari masyarakat yang lebih terdidik dan sadar akan akuntabilitas publik. Dalam kondisi tersebut, daerah dengan tingkat kekayaan tinggi (PAD besar) diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih efektif sehingga meningkatkan kinerja keuangan.

Oleh karena itu, secara konseptual IPM diasumsikan memperkuat hubungan antara kekayaan daerah dan kinerja keuangan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan arah yang berbeda, yaitu IPM justru memperlemah pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada daerah dengan IPM tinggi, peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan efisiensi keuangan. Justru, tingginya IPM seringkali berkorelasi dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik,

seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja publik yang lebih besar, sehingga berpotensi menurunkan efisiensi keuangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aziz & Kusumawati (2024) yang menyatakan bahwa tingginya PAD tidak selalu meningkatkan kinerja keuangan karena cenderung digunakan untuk belanja rutin atau belanja publik yang besar. Selain itu, penelitian Nisa & Tripriyono (2025) juga menunjukkan bahwa variabel pembangunan manusia dapat mengubah arah hubungan antara kapasitas fiskal dan kinerja keuangan, tergantung pada bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan.

4.5.5 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Moderasi Pengaruh Umu pemerintah daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak mampu memoderasi hubungan antara umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kelima tidak didukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan antara lamanya pemerintah daerah berdiri dengan kinerja keuangannya. Dengan kata lain, tinggi-rendahnya IPM suatu daerah tidak membuat umur pemerintah daerah menjadi lebih relevan dalam menentukan kinerja keuangan.

Secara teoritis, dapat dipahami bahwa umur pemerintah daerah dan IPM berada pada dua dimensi yang berbeda. Umur pemerintah daerah lebih merefleksikan pengalaman administratif dan usia kelembagaan, sedangkan IPM mencerminkan kualitas sumber daya manusia masyarakat secara umum. Meskipun secara konseptual daerah yang lebih tua dan memiliki IPM tinggi seharusnya memiliki birokrasi yang lebih matang dan sumber daya manusia yang lebih baik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi keduanya belum tentu menghasilkan perbedaan berarti dalam kinerja keuangan.

Berdasarkan teori institusional, hasil ini menunjukkan bahwa tekanan normatif yang terbentuk dari umur kelembagaan tidak otomatis menjadi lebih efektif meskipun berada di lingkungan masyarakat dengan pembangunan manusia yang lebih baik. Hal ini bisa terjadi karena pengalaman kelembagaan yang panjang tidak selalu diikuti oleh kemampuan birokrasi untuk belajar, beradaptasi, dan bertransformasi. Sebaliknya, daerah yang lebih muda pun dapat memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik apabila didukung tata kelola yang efektif.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa IPM lebih berperan sebagai indikator kualitas sosial masyarakat daripada penguat pengalaman kelembagaan pemerintah daerah. Dengan demikian, kualitas pembangunan manusia tidak cukup untuk menjadikan umur administratif sebagai faktor yang menentukan efisiensi kinerja keuangan.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Setiawan et al. (2023) yang menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, serta Satriawan et al. (2021) yang menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan konteks analisis, di mana penelitian sebelumnya lebih menekankan pengaruh langsung IPM terhadap kinerja, sedangkan penelitian ini menguji peran IPM sebagai variabel moderasi. Dalam konteks moderasi, IPM tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendorong, tetapi juga dapat mengubah arah dan kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi tidak selalu menghasilkan efisiensi keuangan, terutama ketika diiringi dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4.5.6 Indeks Pembangunan Manusia sebagai Moderasi Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak mampu memoderasi hubungan antara tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis keenam tidak didukung,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi-rendahnya IPM tidak mengubah pengaruh tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, baik pada daerah dengan IPM tinggi maupun rendah, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat tetap tidak berubah secara signifikan dalam hubungannya dengan kinerja keuangan daerah.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui teori agensi, dimana ketergantungan pada pusat pada dasarnya merupakan persoalan struktural fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan ini berkaitan dengan sumber pendanaan, distribusi kewenangan, dan kapasitas fiskal daerah. Sementara itu, IPM lebih banyak merefleksikan kualitas manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Karena itu, meskipun masyarakat di suatu daerah memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi, kondisi tersebut belum tentu cukup kuat untuk mengubah struktur ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat.

Berdasarkan sisi teori institusional, IPM yang tinggi memang dapat mendorong tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi. Namun, tekanan sosial tersebut tampaknya belum cukup kuat untuk mengubah dampak ketergantungan fiskal terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, meskipun masyarakat lebih terdidik dan lebih sadar akan pentingnya tata kelola publik, pemerintah daerah tetap

menghadapi keterbatasan fiskal yang sama ketika struktur pendapatannya sangat bergantung pada pusat.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Putri et al. (2025) yang menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi cenderung menurunkan kinerja keuangan, namun dapat diminimalkan jika terdapat faktor pendukung seperti kualitas SDM. Selain itu, penelitian Prayuda & Arifin (2024) menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan tinggi akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, umur pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta menguji peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022–2024 dengan metode analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa temuan yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diikuti dengan pengelolaan keuangan yang efisien.
2. Umur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa lamanya suatu daerah berdiri tidak menjamin peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
3. Tingkat Ketergantungan pada Pusat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi

ketergantungan terhadap dana transfer pusat, maka semakin rendah kinerja keuangan daerah.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi terbukti memperlemah pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pada daerah dengan IPM tinggi, peningkatan PAD tidak selalu meningkatkan efisiensi keuangan karena tingginya tuntutan terhadap pelayanan publik.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat hubungan antara umur pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel moderasi tidak memperkuat hubungan antara tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Keterbatasan data, di mana tidak seluruh laporan keuangan pemerintah daerah dapat diakses, sehingga jumlah sampel menjadi terbatas dan berpotensi mempengaruhi generalisasi hasil penelitian.
2. Periode penelitian yang relatif singkat, yaitu hanya mencakup tahun 2022–2024, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi jangka panjang secara komprehensif.

3. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang relatif kecil, menunjukkan bahwa masih terdapat banyak variabel lain di luar model yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Pengukuran variabel yang terbatas, seperti kinerja keuangan yang hanya menggunakan rasio efisiensi, sehingga belum mencerminkan keseluruhan aspek kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Penggunaan IPM sebagai satu-satunya variabel moderasi, sehingga belum mampu menangkap faktor lain yang mungkin juga berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih diarahkan pada kegiatan yang produktif dan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kesiapan dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah guna menghadapi kondisi darurat, seperti pandemi COVID-19, yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengurangi

ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang dimiliki.

2. Bagi Pengambil Kebijakan (*Stakeholder*)

Pemerintah pusat diharapkan dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan terhadap penggunaan dana transfer agar lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti belanja modal, ukuran pemerintah daerah, atau kualitas audit. Selain itu, dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang serta metode analisis yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, G., Surya, R. A. S., & Silfi, A. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (Bpk) Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Di Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098-1114.
- Arief, M. Z. (2025). Tantangan, implikasi, dan strategi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat terhadap kapasitas fiskal daerah. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(9), 7175-7180.
- Astuti, W., Widaryanti, W., & Wahyuningsih, P. (2022). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 49-57.
- Braian, B., & Indarti, M. G. K. (2025). Determinan kinerja keuangan daerah: Studi pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah. *Community Engagement & Emergence Journal*, 6(4), 2584–2600.
- Diamonalisa, N. N., & Rahman, D. (2022). *Mengolah Data Penelitian Akuntansi Dengan SPSS*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 48(2), 147-160.
- Fitriyah, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris: Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia).
- Gerungan, M. C. (2024). Analisis pengaruh pendapatan daerah terhadap alokasi belanja pemerintah daerah. *Neraca: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–56. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca/article/view/1063>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan IBM SPSS 25. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ilmiyyah, N. M., Dewata, E., & Sarikadarwati, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147-162.

- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, Vol. 76, pp. 305-360.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(1).
- Mappiasse, A. L. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51-55.
- Migang, S., & Zahro, U. L. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 1-9.
- Natariasari, R., Yusrarlaini, Y., & Maiyora, G. (2015). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Studi Empiris Kabupaten/kota di Pulau Sumatera)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nisa, F., & Tripriyono, A. (2025). The effect of convergence of regional original income and balancing funds on financial performance with human development index as a moderation variable in regency/city governments in North Sumatra. *INERGI MULTIDIMEN: International Journal of Management, Economic and Accounting*, 3(5), 418–436.
- Nugroho, R. A., & Muid, D. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 513-527.
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27-34.
- Prayuda, Y. W., & Arfin, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6, 77–87.
- Putri, A. E., Sopiyan, A. R., & Nurhasanah. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 1801–1814.
- Putri, E. R. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012). *Skripsi Universitas Lampung*, 48.

- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 56, 1-14.
- Qowi, R., & Prabowo, T. J. W. (2017). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 298-310.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Dwi Saraswati; Yunita Sari Rioni. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147-153.
- Satriawan, S. D., Sirat, A. H., & Suwito. (2021). The effect of financial performance on human development index of districts and cities governments in North Maluku Province. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(18), 87-95.
- Setiawan, D., Winarna, J., & Nugroho, Y. P. (2023). Human development index and local government performance: Evidence from Central Java Province, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023, 230-237.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 4.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Simbolon, H. A. U., & Kurniawan, C. H. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54-70.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(2), 153-173.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Seluruh Sample

Tahun	Wilayah	KK	TKD	UPD	TKPP	IPM
2024	Kab, Badung	1.042	0,87086	65	0,13804	83,87
2023	Kab, Badung	1.010	0,87414	64	0,13046	83,08
2022	Kab, Bandung	1.029	0,20934	72	0,77329	73,16
2024	Kab, Bandung	1.027	0,19983	74	0,78347	74,27
2023	Kab, Bandung	1.012	0,20385	73	0,78627	73,74
2023	Kab, Bangli	1.022	0,17389	64	0,81524	70,79
2024	Kab, Bangli	0,99	0,16764	65	0,83509	71,34
2024	Kab, Bantul	1.003	0,24472	68	0,75453	81,74
2023	Kab, Bantul	0,998	0,24314	67	0,75671	81,39
2022	Kab, Bantul	1.005	0,23913	66	0,75679	80,69
2022	Kab, Bekasi	1.046	0,4304	71	0,5481	75,22
2023	Kab, Bekasi	1.022	0,43472	72	0,5555	75,76
2024	Kab, Bekasi	1.005	0,42879	73	0,56976	76,44
2023	Kab, Bengkayang	1.041	0,06557	23	0,91783	69,53
2024	Kab, Bengkayang	1.007	0,07075	24	0,92927	70,3
2024	Kab, Bima	0,995	0,11486	66	0,8811	68,94
2022	Kab, Bima	1.043	0,06831	64	0,89247	67,57
2023	Kab, Bima	1.000	0,08347	65	0,9146	68,28
2024	Kab, Bogor	1.018	0,4216	74	0,5697	72,39
2022	Kab, Bogor	1.031	0,40783	72	0,57102	71,2
2023	Kab, Bogor	0,987	0,40741	75	0,59188	71,78
2023	Kab, Buleleng	0,995	0,20773	64	0,78193	73,97
2022	Kab, Buleleng	1.000	0,19749	63	0,79372	73,45
2024	Kab, Buleleng	0,95	0,21485	65	0,81161	74,52
2024	Kab, Buru	1.004	0,04452	24	0,94231	71,01
2022	Kab, Buru	0,991	0,03742	22	0,96441	69,94
2023	Kab, Buru	0,977	0,03949	23	0,96662	70,56
2024	Kab, Buru Selatan	1.044	0,0226	45	0,95276	67,09
2022	Kab, Buru Selatan	1.014	0,0242	34	0,96714	65,37
2023	Kab, Buru Selatan	0,961	0,02873	40	0,98695	66,23
2024	Kab, Buton Selatan	1.029	0,04108	24	0,94826	67
2023	Kab, Buton Selatan	1.009	0,03275	23	0,9526	66,15
2023	Kab, Buton Tengah	1.060	0,02654	23	0,93313	65,83
2024	Kab, Buton Tengah	1.014	0,041	22	0,95574	66,47
2022	Kab, Buton Tengah	1.014	0,02774	23	0,96171	65,29

2024	Kab, Buton Utara	0,951	0,04183	16	0,98592	70,6
2022	Kab, Ciamis	1.045	0,11257	72	0,8582	71,45
2023	Kab, Ciamis	1.012	0,09837	73	0,89655	72,05
2024	Kab, Ciamis	0,952	0,11062	74	0,91502	72,56
2023	Kab, Cianjur	1.022	0,15178	73	0,81465	66,55
2024	Kab, Cianjur	0,998	0,18145	74	0,82127	67,24
2022	Kab, Cianjur	1.005	0,13974	72	0,83038	65,94
2023	Kab, Cirebon	1.029	0,18533	73	0,80233	70,95
2022	Kab, Cirebon	0,99	0,19845	72	0,8083	70,06
2024	Kab, Cirebon	1.032	0,17302	74	0,81319	71,44
2024	Kab, Dompu	0,96	0,16108	66	0,84732	70,78
2023	Kab, Dompu	1.045	0,09839	65	0,8661	69,98
2022	Kab, Dompu	0,986	0,10498	64	0,88616	69,15
2023	Kab, Fak Fak	1.053	0,01579	53	0,94443	69,72
2024	Kab, Fak Fak	0,98	0,87332	54	0,94577	70,39
2022	Kab, Fak Fak	1.016	0,02419	52	0,96047	69,12
2022	Kab, Garut	1.013	0,10505	72	0,87803	67,41
2023	Kab, Garut	1.007	0,11205	73	0,88141	68,11
2024	Kab, Garut	0,992	0,10831	74	0,89213	68,79
2023	Kab, Gianyar	0,935	0,58499	64	0,44717	79,24
2022	Kab, Gianyar	1.009	0,40972	63	0,58677	78,39
2023	Kab, Indragiri Hilir	1.063	0,10045	58	0,87121	68,38
2022	Kab, Indragiri Hilir	1.024	0,08855	56	0,90214	67,37
2022	Kab, Indragiri Hilir	1.004	0,09212	57	0,90806	67,98
2023	Kab, Indragiri Hulu	1.048	0,06954	66	0,89617	71,04
2022	Kab, Indragiri Hulu	1.027	0,08082	65	0,89928	70,46
2023	Kab, Indramayu	1.014	0,17807	73	0,80851	69,25
2024	Kab, Indramayu	1.024	0,1785	74	0,81161	69,83
2022	Kab, Indramayu	0,971	0,17106	72	0,83901	68,55
2023	Kab, Jembrana	1.021	0,19776	64	0,79399	68,91
2022	Kab, Jembrana	1.033	0,16062	63	0,82541	73,58
2024	Kab, Jembrana	0,997	0,1492	65	0,85446	74,6
2022	Kab, Kaimana	0,967	0,02368	19	0,98011	66,11
2023	Kab, Kaimana	0,944	0,023	20	100.529	66,72
2024	Kab, Kampar	1.022	0,1469	73	0,84359	74,08
2022	Kab, Kampar	1.022	0,10728	71	0,88367	73,84
2023	Kab, Kampar	0,958	0,10919	72	0,91279	74,24
2022	Kab, Kapuas Hulu	1.031	0,0451	71	0,90629	66,7
2024	Kab, Kapuas Hulu	1.007	0,05047	33	0,94317	68,58
2023	Kab, Kapuas Hulu	0,993	0,04259	32	0,95844	67,67
2024	Kab, Karangasem	1.022	0,23596	65	0,75509	69,74

2023	Kab, Karangasem	0,965	0,23224	64	0,78563	68,91
2022	Kab, Karangasem	0,982	0,19103	63	0,80434	68,28
2024	Kab, Karawang	1.015	0,32115	74	0,65832	72,9
2023	Kab, Karawang	1.001	0,32641	73	0,66028	72,35
2022	Kab, Karawang	1.001	0,32521	72	0,66138	71,74
2022	Kab, Kayong Utara	1.015	0,05151	41	0,90476	63,81
2024	Kab, Kayong Utara	1.038	0,05764	16	0,92741	65,74
2023	Kab, Kayong Utara	1.026	0,06034	15	0,93042	64,79
2024	Kab, Kepulauan Aru	1.001	0,0326	20	0,96511	65,83
2023	Kab, Kepulauan Aru	0,991	0,03501	19	0,96768	65,01
2022	Kab, Kepulauan Aru	0,985	0,02874	18	0,98235	64,21
2022	Kab, Kepulauan Meranti	1.072	0,07634	35	0,88065	66,52
2023	Kab, Kepulauan Meranti	0,968	0,12263	43	0,8958	67,28
2024	Kab, Kepulauan Meranti	0,988	0,08592	15	0,92351	67,92
2024	Kab, Kepulauan Tanimbar	1.012	0,0505	21	0,94721	64,83
2023	Kab, Kepulauan Tanimbar	0,932	0,02857	30	0,99871	64,16
2022	Kab, Klungkung	1.053	0,26959	63	0,70618	72,55
2024	Kab, Klungkung	0,989	0,28458	65	0,72249	74,04
2023	Kab, Klungkung	0,989	0,25576	64	0,75131	73,11
2023	Kab, Kolaka	1.035	0,09858	62	0,87947	74,72
2024	Kab, Kolaka	1.006	0,10613	63	0,89195	75,18
2022	Kab, Kolaka	0,938	0,13051	61	0,89951	73,98
2024	Kab, Kolaka Timur	1.028	0,04849	34	0,94108	70,27
2023	Kab, Kolaka Timur	1.018	0,03108	24	0,94436	69,57
2023	Kab, Kolaka Utara	1.048	0,06107	19	0,90546	71,04
2024	Kab, Kolaka Utara	0,965	0,07018	20	0,9481	71,7
2022	Kab, Kolaka Utara	0,932	0,05952	16	0,96922	70,39
2022	Kab, Konawe	0,981	0,13057	62	0,8706	72,04
2024	Kab, Konawe	0,955	0,14755	64	0,87213	73,39
2023	Kab, Konawe	1.008	0,10199	63	0,88761	72,77
2024	Kab, Konawe Kepulauan	1.048	0,02982	35	0,94999	67,99
2022	Kab, Konawe Kepulauan	0,955	0,01962	34	100.182	66,69
2024	Kab, Konawe Selatan	1.045	0,08491	20	0,89653	71,19
2022	Kab, Konawe Selatan	0,999	0,05605	18	0,9397	69,36
2023	Kab, Kuantan Singingi	1.001	0,13269	23	0,8697	71,67
2022	Kab, Kuantan Singingi	0,958	0,05851	22	0,95721	71,09
2022	Kab, Kubu Raya	1.045	0,10603	44	0,84464	68,91
2024	Kab, Kubu Raya	0,998	0,14142	16	0,86294	70,25
2024	Kab, Kulon Progo	1.013	0,20404	72	0,79089	76,14
2022	Kab, Kulon Progo	1.001	0,20138	70	0,79583	75,46

2023	Kab, Kulon Progo	0,999	0,19107	71	0,80665	75,79
2024	Kab, Kuningan	1.006	0,10962	74	0,87361	71,26
2023	Kab, Kuningan	0,997	0,10767	73	0,87869	70,72
2022	Kab, Landak	1.026	0,05503	22	0,9203	67,17
2023	Kab, Landak	1.020	0,04678	23	0,92886	68,14
2024	Kab, Landak	1.001	0,06353	24	0,93904	69,08
2023	Kab, Lombok Barat	0,977	0,19185	63	0,81984	70,15
2022	Kab, Lombok Barat	1.005	0,15518	62	0,8429	69,41
2022	Kab, Lombok Tengah	0,958	0,13066	76	0,83588	67,57
2024	Kab, Lombok Tengah	0,959	0,16123	31	0,86172	69,17
2023	Kab, Lombok Tengah	0,992	0,11525	33	0,87321	68,4
2024	Kab, Lombok Timur	0,967	0,14685	65	0,86239	69,23
2023	Kab, Lombok Timur	0,936	0,13529	64	0,89308	68,41
2023	Kab, Lombok Utara	1.017	0,19827	44	0,77341	66,62
2022	Kab, Lombok Utara	0,991	0,16041	40	0,84257	65,7
2024	Kab, Majalengka	1.014	0,169	74	0,82605	69,74
2023	Kab, Majalengka	1.001	0,1751	73	0,82627	69,13
2022	Kab, Majalengka	0,995	0,15978	72	0,8266	68,56
2023	Kab, Maluku Barat Daya	1.053	0,05248	44	0,91736	63,93
2024	Kab, Maluku Barat Daya	0,992	0,03288	46	0,93817	64,86
2022	Kab, Maluku Tengah	1.034	0,05262	63	0,87766	71,81
2023	Kab, Maluku Tengah	0,995	0,05021	64	0,94487	72,45
2024	Kab, Maluku Tengah	0,997	0,04162	65	0,94938	73,21
2022	Kab, Maluku Tenggara	1.055	0,05481	69	0,90363	66,88
2024	Kab, Maluku Tenggara	1.029	0,05667	71	0,9315	68,24
2022	Kab, Manokwari	1.002	0,06487	52	0,91285	72,6
2024	Kab, Manokwari	0,976	0,07338	54	0,9411	73,83
2023	Kab, Manokwari	0,972	0,06116	53	0,94964	73,21
2023	Kab, Manokwari Selatan	1.003	0,87444	32	0,97064	61,55
2022	Kab, Manokwari Selatan	0,985	0,86753	21	0,98492	60,68
2024	Kab, Manokwari Selatan	0,943	0,84556	21	100.880	62,45
2024	Kab, Melawi	1.039	0,0492	25	0,9343	68,66
2022	Kab, Melawi	1.006	0,04221	18	0,95192	66,81
2023	Kab, Melawi	0,969	0,03306	19	0,97856	67,76
2024	Kab, Mempawah	1.057	0,12323	64	0,83707	68,56
2023	Kab, Mempawah	1.022	0,13892	63	0,83933	67,92
2022	Kab, Mempawah	0,987	0,14721	62	0,8508	66,94
2024	Kab, Muna Barat	1.010	0,04263	21	0,9435	68,06
2023	Kab, Pangandaran	1.007	0,18195	35	0,81741	69,38
2024	Kab, Pangandaran	1.032	0,16757	37	0,81954	69,85
2022	Kab, Pangandaran	0,969	0,1719	22	0,84642	69,03

2023	Kab, Pegunungan Arfak	1.026	0,87334	36	0,96972	57,82
2022	Kab, Pegunungan Arfak	0,948	0,85667	21	101.150	57,01
2022	Kab, Purwakarta	0,994	0,24907	53	0,75599	71,56
2024	Kab, Purwakarta	1.002	0,2444	55	0,75619	72,65
2023	Kab, Purwakarta	1.006	0,23394	54	0,76527	72,09
2024	Kab, Rokan Hilir	0,998	0,17851	24	0,82553	71,2
2023	Kab, Rokan Hilir	0,998	0,06878	23	0,93553	70,78
2022	Kab, Rokan Hulu	1.025	0,06868	22	0,86464	70,31
2024	Kab, Rokan Hulu	1.035	0,09033	24	0,8959	71,82
2023	Kab, Rokan Hulu	0,984	0,08047	23	0,93074	71,02
2022	Kab, Sambas	1.064	0,09822	64	0,8548	67,95
2023	Kab, Sambas	1.011	0,12363	65	0,85585	68,69
2024	Kab, Sambas	0,941	0,10899	66	0,92171	69,31
2022	Kab, Sanggau	1.034	0,09265	62	0,885	66,91
2024	Kab, Sanggau	1.035	0,09746	64	0,88779	68,43
2023	Kab, Sanggau	0,978	0,08427	63	0,92897	67,77
2024	Kab, Sekadau	1.030	0,06188	20	0,89909	67,25
2022	Kab, Sekadau	1.058	0,05858	18	0,9104	65,58
2023	Kab, Sekadau	0,974	0,06514	19	0,94372	66,33
2022	Kab, Seram Bagian Barat	1.037	0,02343	18	0,93746	66,67
2024	Kab, Seram Bagian Barat	1.035	0,03069	32	0,94095	68,39
2024	Kab, Seram Bagian Timur	1.025	0,03859	25	0,9216	66,24
2022	Kab, Seram Bagian Timur	1.023	0,01636	18	0,93405	65,05
2023	Kab, Seram Bagian Timur	1.004	0,01718	19	0,96503	65,82
2023	Kab, Siak	0,974	0,27924	23	0,73622	74,98
2024	Kab, Sleman	1.015	0,36568	76	0,62555	85,61
2023	Kab, Sleman	1.009	0,3665	75	0,62721	84,77
2022	Kab, Sleman	1.011	0,35298	74	0,6408	84,31
2024	Kab, Subang	0,976	0,19429	75	0,81393	71,36
2023	Kab, Subang	0,981	0,18094	74	0,81845	70,7
2022	Kab, Subang	1.016	0,11637	73	0,86958	69,87
2023	Kab, Sukabumi	1.003	0,17327	74	0,82155	68,49
2022	Kab, Sukabumi	0,988	0,17347	72	0,82168	67,64
2024	Kab, Sukabumi	0,983	0,16628	74	0,84181	68,97
2024	Kab, Sumbawa	0,968	0,13064	64	0,87215	70,55
2022	Kab, Sumbawa	0,995	0,10213	62	0,88687	68,89
2023	Kab, Sumbawa	1.005	0,09428	63	0,89087	69,87
2023	Kab, Sumedang	1.026	0,18229	75	0,80662	73,18
2024	Kab, Sumedang	1.009	0,18522	76	0,81055	73,73

2022	Kab, Sumedang	1.004	0,18569	74	0,81305	72,69
2023	Kab, Tabanan	1.004	0,2539	64	0,74597	77,43
2022	Kab, Tabanan	1.000	0,24459	63	0,75731	76,75
2024	Kab, Tabanan	0,962	0,25705	65	0,76337	78,42
2024	Kab, Tasikmalaya	1.049	0,10064	73	0,87603	68,36
2022	Kab, Tasikmalaya	1.007	0,0969	71	0,89709	66,84
2023	Kab, Tasikmalaya	0,987	0,09491	72	0,91091	67,76
2024	Kab, Teluk Wondama	1.005	0,03233	33	0,95407	62,36
2022	Kab, Teluk Wondama	1.020	0,02723	18	0,95826	60,87
2023	Kab, Teluk Wondama	0,987	0,02579	19	0,9734	61,67
2023	Kota Ambon	0,989	0,21262	65	0,77999	82,06
2024	Kota Ambon	1.015	0,16312	66	0,82078	82,56
2022	Kota Bandung	1.009	0,42933	76	0,56579	73,16
2024	Kota Bandung	0,988	0,43216	78	0,57391	83,52
2023	Kota Bandung	0,977	0,42498	77	0,58647	83,04
2022	Kota Banjar	1.044	0,17315	15	0,78042	72,55
2024	Kota Banjar	1.013	0,17736	20	0,81938	73,64
2023	Kota Banjar	1.004	0,17328	19	0,82795	73,08
2023	Kota Bau-bau	1.032	0,11136	21	0,86442	77,52
2024	Kota Bau-bau	0,973	0,14633	22	0,87012	78,13
2023	Kota Bekasi	1.044	0,44454	25	0,53598	83,03
2024	Kota Bekasi	1.030	0,42424	26	0,56319	83,54
2022	Kota Bekasi	0,976	0,44325	24	0,57062	82,46
2024	Kota Bima	0,993	0,15765	40	0,84853	78,04
2023	Kota Bima	1.073	0,06655	20	0,88907	77,36
2024	Kota Bogor	1.003	0,46006	74	0,53933	78,52
2023	Kota Bogor	1.021	0,4511	73	0,53953	77,85
2022	Kota Bogor	1.071	0,41176	74	0,55447	77,17
2023	Kota Cimahi	1.074	0,30427	21	0,66215	79,46
2024	Kota Cimahi	0,995	0,31933	22	0,68572	80,08
2022	Kota Cimahi	1.035	0,29652	20	0,68906	78,77
2024	Kota Cirebon	1.017	0,35958	73	0,63083	77,08
2023	Kota Cirebon	0,991	0,36553	72	0,63868	76,46
2022	Kota Cirebon	0,97	0,36571	71	0,64936	75,89
2023	Kota Denpasar	0,934	0,48144	30	0,54507	84,73
2022	Kota Denpasar	0,961	0,4216	29	0,59226	84,37
2024	Kota Dumai	1.009	0,3385	24	0,65957	76,19
2023	Kota Dumai	1.019	0,29664	23	0,69671	75,66
2023	Kota Kendari	1.061	0,2431	27	0,71781	84,85
2024	Kota Kendari	1.015	0,23657	28	0,75862	85,33
2023	Kota Pekanbaru	1.026	0,32337	67	0,66541	82,38

2024	Kota Pekanbaru	0,993	0,3323	68	0,67259	82,89
2022	Kota Pekanbaru	1.005	0,32228	66	0,67682	82,06
2022	Kota Pontianak	0,979	0,31544	62	0,69217	80,48
2024	Kota Pontianak	0,995	0,30645	64	0,69765	81,57
2023	Kota Pontianak	0,939	0,31638	63	0,71107	81,03
2023	Kota Singkawang	1.030	0,24847	21	0,7397	73,39
2024	Kota Singkawang	0,987	0,26865	22	0,7405	73,87
2023	Kota Sukabumi	1.016	0,32356	37	0,65792	76,32
2024	Kota Sukabumi	1.000	0,32824	32	0,66198	76,85
2022	Kota Sukabumi	1.036	0,2992	36	0,67523	75,4
2023	Kota Tasikmalaya	1.010	0,21445	41	0,78318	74,47
2022	Kota Tasikmalaya	0,983	0,17446	20	0,79327	73,83
2024	Kota Tasikmalaya	0,999	0,19625	22	0,80728	75,04
2024	Kota Tual	1.076	0,05218	16	0,91428	70,21
2022	Kota Tual	0,987	0,03748	42	0,93381	68,6
2023	Kota Tual	0,966	0,04821	47	0,9429	69,43
2024	Kota Yogyakarta	1.005	0,41079	76	0,58711	88,77
2023	Kota Yogyakarta	0,986	0,4025	75	0,60538	88,28
2022	Kota Yogyakarta	0,967	0,38392	74	0,63338	87,69

Lampiran 2 Perhitungan KK

LOKASI	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	BELANJA DAERAH	KINERJA KEUANGAN
Kab. Badung	2023	7.217.252.183.431	7.287.698.714.295	1,010
Kab. Badung	2024	8.620.177.970.049	8.982.940.749.787	1,042
Kab. Bandung	2022	5.910.228.108.514	6.080.675.719.686	1,029
Kab. Bandung	2023	6.361.706.741.689	6.437.564.839.714	1,012
Kab. Bandung	2024	6.934.981.898.275	7.119.131.986.721	1,027
Kab. Bangli	2023	1.264.668.588.709	1.292.282.977.583	1,022
Kab. Bangli	2024	1.332.186.446.451	1.318.951.209.868	0,990
Kab. Bantul	2022	2.260.577.439.196	2.272.474.588.197	1,005
Kab. Bantul	2024	2.609.413.354.405	2.616.013.652.967	1,003
Kab. Bantul	2023	2.416.084.417.355	2.411.425.977.528	0,998
Kab. Bekasi	2022	5.896.615.937.108	6.169.829.401.302	1,046
Kab. Bekasi	2023	6.596.894.786.390	6.741.804.528.802	1,022
Kab. Bekasi	2024	7.186.021.408.378	7.221.336.012.549	1,005
Kab. Bengkayang	2023	1.250.790.429.072	1.301.927.774.630	1,041
Kab. Bengkayang	2024	1.188.484.024.754	1.197.315.725.767	1,007
Kab. Bima	2022	1.776.019.897.969	1.852.564.024.891	1,043
Kab. Bima	2023	1.852.652.619.631	1.852.067.007.213	1,000
Kab. Bima	2024	2.090.724.830.810	2.079.876.540.632	0,995
Kab. Bogor	2022	9.029.607.236.616	9.310.402.757.366	1,031
Kab. Bogor	2023	9.739.562.713.545	9.617.627.560.694	0,987
Kab. Bogor	2024	10.923.025.118.687	11.114.545.400.331	1,018
Kab. Buleleng	2022	2.078.952.625.994	2.079.736.130.303	1,000

Kab. Buleleng	2023	2.216.868.306.840	2.205.123.101.991	0,995
Kab. Buleleng	2024	2.534.670.913.550	2.407.477.114.683	0,950
Kab. Buru	2022	833.550.859.298	826.214.156.394	0,991
Kab. Buru	2023	777.460.897.778	759.936.538.878	0,977
Kab. Buru	2024	829.493.912.404	833.196.581.522	1,004
Kab. Buru Selatan	2022	641.418.118.955	650.270.827.582	1,014
Kab. Buru Selatan	2023	665.349.206.137	639.120.674.079	0,961
Kab. Buru Selatan	2024	707.395.236.213	738.647.313.327	1,044
Kab. Buton Selatan	2023	581.468.612.731	586.897.167.962	1,009
Kab. Buton Selatan	2024	671.635.987.613	691.003.851.195	1,029
Kab. Buton Tengah	2023	711.590.421.402	754.178.414.261	1,060
Kab. Buton Tengah	2022	674.033.441.451	683.589.515.468	1,014
Kab. Buton Tengah	2024	738.169.617.521	748.627.462.688	1,014
Kab. Buton Utara	2024	785.301.868.130	746.926.461.524	0,951
Kab. Ciamis	2022	2.684.529.798.485	2.806.195.881.968	1,045
Kab. Ciamis	2023	2.786.680.325.550	2.819.125.094.425	1,012
Kab. Ciamis	2024	2.820.124.311.622	2.684.419.954.103	0,952
Kab. Cianjur	2022	3.978.964.224.762	3.997.435.902.590	1,005
Kab. Cianjur	2023	4.277.102.593.941	4.372.737.679.510	1,022
Kab. Cianjur	2024	4.604.513.607.952	4.596.802.048.731	0,998
Kab. Cirebon	2022	4.032.056.972.706	3.993.080.396.110	0,990
Kab. Cirebon	2023	4.017.267.994.688	4.132.750.422.628	1,029
Kab. Cirebon	2024	4.464.635.080.497	4.608.556.270.530	1,032
Kab. Dompu	2022	1.190.229.548.801	1.173.359.575.035	0,986

Kab. Dompu	2023	1.146.064.800.836	1.197.696.637.889	1,045
Kab. Dompu	2024	1.312.172.188.618	1.259.050.961.691	0,960
Kab. Fak Fak	2022	1.305.849.555.818	1.326.998.761.555	1,016
Kab. Fak Fak	2023	1.430.219.550.382	1.506.021.842.521	1,053
Kab. Fak Fak	2024	1.531.522.264.918	1.500.365.448.694	0,980
Kab. Garut	2022	4.626.954.746.948	4.688.419.590.763	1,013
Kab. Garut	2023	4.780.438.457.960	4.812.745.818.050	1,007
Kab. Garut	2024	4.968.925.212.933	4.928.486.622.097	0,992
Kab. Gianyar	2022	2.093.010.626.624	2.111.421.453.005	1,009
Kab. Gianyar	2023	2.528.821.329.163	2.365.325.814.372	0,935
Kab. Indragiri Hilir	2022	1.895.777.996.320	1.940.680.914.276	1,024
Kab. Indragiri Hilir	2023	2.097.081.414.493	2.105.165.064.419	1,004
Kab. Indragiri Hilir	2024	2.057.359.021.736	2.186.767.247.054	1,063
Kab. Indragiri Hulu	2022	1.487.376.159.148	1.527.833.547.056	1,027
Kab. Indragiri Hulu	2023	1.607.409.344.684	1.683.966.138.255	1,048
Kab. Indramayu	2022	3.293.006.392.610	3.197.438.933.819	0,971
Kab. Indramayu	2023	3.536.349.758.981	3.585.050.751.111	1,014
Kab. Indramayu	2024	3.650.581.421.499	3.736.422.036.484	1,024
Kab. Jembrana	2022	1.095.691.565.639	1.131.655.987.520	1,033
Kab. Jembrana	2023	1.120.324.778.259	1.143.362.500.913	1,021
Kab. Jembrana	2024	1.237.091.971.583	1.232.980.643.518	0,997
Kab. Kaimana	2022	1.101.428.459.609	1.065.247.409.962	0,967
Kab. Kaimana	2023	1.268.311.578.689	1.197.808.646.946	0,944
Kab. Kampar	2022	2.427.503.585.553	2.480.592.185.574	1,022

Kab. Kampar	2023	2.734.805.625.683	2.619.084.986.874	0,958
Kab. Kampar	2024	3.009.580.749.240	3.075.162.600.393	1,022
Kab. Kapuas Hulu	2022	1.566.982.253.919	1.615.623.766.662	1,031
Kab. Kapuas Hulu	2023	1.723.722.235.977	1.711.410.699.681	0,993
Kab. Kapuas Hulu	2024	1.829.271.556.884	1.841.646.074.683	1,007
Kab. Karangasem	2022	1.577.410.438.959	1.548.907.880.948	0,982
Kab. Karangasem	2023	1.641.545.932.774	1.583.642.341.523	0,965
Kab. Karangasem	2024	1.840.886.441.360	1.881.895.709.920	1,022
Kab. Karawang	2022	4.802.598.262.500	4.806.740.763.915	1,001
Kab. Karawang	2023	5.196.315.407.231	5.203.555.794.737	1,001
Kab. Karawang	2024	5.686.622.840.656	5.774.406.909.338	1,015
Kab. Kayong Utara	2022	771.708.567.581	783.566.317.019	1,015
Kab. Kayong Utara	2023	822.442.626.546	843.786.761.184	1,026
Kab. Kayong Utara	2024	786.216.294.748	815.930.519.588	1,038
Kab. Kepulauan Aru	2022	754.113.297.342	742.463.495.913	0,985
Kab. Kepulauan Aru	2023	912.676.924.898	904.632.783.995	0,991
Kab. Kepulauan Aru	2024	926.497.807.572	927.790.241.729	1,001
Kab. Kepulauan Meranti	2022	1.065.125.835.211	1.141.714.039.656	1,072
Kab. Kepulauan Meranti	2023	1.180.122.990.490	1.142.428.599.203	0,968
Kab. Kepulauan Meranti	2024	1.139.908.805.098	1.126.226.701.733	0,988
Kab. Kepulauan Tanimbar	2023	819.044.559.604	763.570.017.254	0,932
Kab. Kepulauan Tanimbar	2024	872.277.367.375	882.757.865.981	1,012
Kab. Klungkung	2022	1.147.881.200.993	1.209.203.552.416	1,053
Kab. Klungkung	2023	1.370.586.084.746	1.355.627.177.837	0,989

Kab. Klungkung	2024	1.475.431.453.902	1.459.500.695.815	0,989
Kab. Kolaka	2022	1.304.869.645.917	1.223.846.089.747	0,938
Kab. Kolaka	2023	1.731.102.864.015	1.792.164.292.498	1,035
Kab. Kolaka	2024	1.783.407.793.794	1.794.386.141.386	1,006
Kab. Kolaka Timur	2023	793.327.473.254	807.345.850.507	1,018
Kab. Kolaka Timur	2024	876.989.582.253	901.521.253.226	1,028
Kab. Kolaka Utara	2022	936.628.940.493	873.284.966.201	0,932
Kab. Kolaka Utara	2023	970.266.672.561	1.016.980.016.017	1,048
Kab. Kolaka Utara	2024	1.142.586.382.291	1.102.889.843.915	0,965
Kab. Konawe	2022	1.490.004.684.542	1.461.881.033.473	0,981
Kab. Konawe	2023	1.652.476.720.349	1.665.884.048.160	1,008
Kab. Konawe	2024	1.842.636.724.950	1.759.937.864.353	0,955
Kab. Konawe Kepulauan	2022	546.306.548.600	521.656.952.333	0,955
Kab. Konawe Kepulauan	2024	643.585.044.876	674.402.736.118	1,048
Kab. Konawe Selatan	2022	1.551.853.291.167	1.549.541.358.717	0,999
Kab. Konawe Selatan	2024	1.742.118.838.661	1.820.059.679.483	1,045
Kab. Kuantan Singingi	2022	1.313.503.378.952	1.257.939.014.018	0,958
Kab. Kuantan Singingi	2023	1.544.473.160.461	1.546.133.123.161	1,001
Kab. Kubu Raya	2022	1.557.558.858.427	1.628.205.312.414	1,045
Kab. Kubu Raya	2024	1.790.615.563.779	1.786.190.875.666	0,998
Kab. Kulon Progo	2022	1.530.236.282.275	1.531.202.507.232	1,001
Kab. Kulon Progo	2023	1.695.996.921.752	1.694.770.096.248	0,999
Kab. Kulon Progo	2024	1.755.011.581.883	1.778.569.823.071	1,013
Kab. Kuningan	2023	2.842.021.968.214	2.832.406.522.597	0,997

Kab. Kuningan	2024	2.858.286.478.898	2.874.451.183.026	1,006
Kab. Landak	2022	1.331.489.541.094	1.365.900.343.641	1,026
Kab. Landak	2023	1.338.510.857.505	1.365.089.477.795	1,020
Kab. Landak	2024	1.408.063.281.571	1.408.818.476.304	1,001
Kab. Lombok Barat	2022	1.732.193.283.374	1.740.587.495.615	1,005
Kab. Lombok Barat	2023	1.780.213.408.241	1.740.037.330.520	0,977
Kab. Lombok Tengah	2022	2.165.880.757.454	2.075.249.763.239	0,958
Kab. Lombok Tengah	2023	2.278.299.769.298	2.261.190.989.048	0,992
Kab. Lombok Tengah	2024	2.729.660.115.585	2.617.596.128.125	0,959
Kab. Lombok Timur	2023	2.853.354.967.184	2.671.513.280.956	0,936
Kab. Lombok Timur	2024	3.316.043.939.538	3.208.094.396.887	0,967
Kab. Lombok Utara	2022	912.898.166.331	904.348.409.082	0,991
Kab. Lombok Utara	2023	1.039.089.731.592	1.057.028.843.544	1,017
Kab. Majalengka	2022	3.005.180.448.508	2.989.809.631.263	0,995
Kab. Majalengka	2023	3.023.014.286.534	3.024.588.240.018	1,001
Kab. Majalengka	2024	3.137.439.996.281	3.179.987.890.985	1,014
Kab. Maluku Barat Daya	2023	911.929.404.695	960.565.597.276	1,053
Kab. Maluku Barat Daya	2024	920.441.273.222	913.161.023.731	0,992
Kab. Maluku Tengah	2022	1.537.672.338.670	1.589.911.222.474	1,034
Kab. Maluku Tengah	2023	1.640.836.237.786	1.632.575.153.528	0,995
Kab. Maluku Tengah	2024	1.689.407.779.549	1.683.532.251.791	0,997
Kab. Maluku Tenggara	2022	893.152.891.161	942.046.175.474	1,055
Kab. Maluku Tenggara	2024	900.784.547.799	926.952.905.748	1,029
Kab. Manokwari	2022	1.358.552.655.750	1.361.196.771.320	1,002

Kab. Manokwari	2023	1.594.790.654.069	1.550.437.587.823	0,972
Kab. Manokwari	2024	1.559.787.897.881	1.522.068.389.816	0,976
Kab. Manokwari Selatan	2022	698.585.709.052	688.165.255.445	0,985
Kab. Manokwari Selatan	2023	866.071.329.616	868.603.237.703	1,003
Kab. Manokwari Selatan	2024	851.580.445.192	802.734.410.436	0,943
Kab. Melawi	2022	1.034.736.581.819	1.041.062.858.228	1,006
Kab. Melawi	2023	1.152.062.921.827	1.116.091.731.314	0,969
Kab. Melawi	2024	1.109.632.777.548	1.153.375.565.135	1,039
Kab. Mempawah	2022	1.049.304.823.149	1.035.892.382.407	0,987
Kab. Mempawah	2023	1.072.437.997.870	1.095.800.516.373	1,022
Kab. Mempawah	2024	1.196.507.616.280	1.265.047.265.956	1,057
Kab. Muna Barat	2024	711.049.521.710	717.941.380.063	1,010
Kab. Pangandaran	2022	1.493.615.029.265	1.446.936.360.862	0,969
Kab. Pangandaran	2023	1.334.214.286.772	1.343.490.829.836	1,007
Kab. Pangandaran	2024	1.433.017.885.265	1.478.829.463.096	1,032
Kab. Pegunungan Arfak	2022	919.161.274.048	871.399.081.361	0,948
Kab. Pegunungan Arfak	2023	1.102.528.726.975	1.130.786.827.557	1,026
Kab. Purwakarta	2022	2.256.119.657.743	2.242.044.938.124	0,994
Kab. Purwakarta	2023	2.371.774.256.872	2.385.366.153.224	1,006
Kab. Purwakarta	2024	2.548.811.674.513	2.554.467.819.500	1,002
Kab. Rokan Hilir	2023	2.161.915.220.836	2.158.499.275.338	0,998
Kab. Rokan Hilir	2024	2.544.339.739.897	2.538.205.887.991	0,998

Kab. Rokan Hulu	2022	1.577.310.409.474	1.616.493.547.905	1,025
Kab. Rokan Hulu	2023	1.845.813.897.701	1.815.923.804.112	0,984
Kab. Rokan Hulu	2024	1.787.833.016.749	1.850.379.767.711	1,035
Kab. Sambas	2022	1.706.793.890.995	1.816.573.584.717	1,064
Kab. Sambas	2023	1.867.559.599.104	1.888.255.229.042	1,011
Kab. Sambas	2024	2.102.272.191.828	1.978.071.807.107	0,941
Kab. Sanggau	2022	1.590.132.140.160	1.644.295.744.753	1,034
Kab. Sanggau	2023	1.888.904.848.548	1.847.765.782.134	0,978
Kab. Sanggau	2024	1.807.274.011.570	1.871.265.137.737	1,035
Kab. Sekadau	2022	852.887.481.102	901.985.478.371	1,058
Kab. Sekadau	2023	921.951.226.101	897.643.361.651	0,974
Kab. Sekadau	2024	950.227.128.977	978.406.933.767	1,030
Kab. Seram Bagian Barat	2022	905.593.821.522	938.860.714.948	1,037
Kab. Seram Bagian Barat	2024	967.411.067.004	1.001.357.085.678	1,035
Kab. Seram Bagian Timur	2022	950.159.289.436	971.801.623.024	1,023
Kab. Seram Bagian Timur	2023	1.005.658.326.265	1.009.866.317.968	1,004
Kab. Seram Bagian Timur	2024	990.361.660.942	1.014.672.728.484	1,025
Kab. Siak	2023	2.731.666.927.765	2.659.471.386.894	0,974
Kab. Sleman	2022	3.005.980.155.063	3.040.474.126.756	1,011
Kab. Sleman	2023	3.083.612.992.325	3.112.705.809.034	1,009
Kab. Sleman	2024	3.238.107.257.278	3.287.530.719.211	1,015
Kab. Subang	2022	2.687.865.111.928	2.731.496.478.898	1,016
Kab. Subang	2023	3.286.595.470.769	3.224.405.752.327	0,981
Kab. Subang	2024	3.696.270.083.723	3.605.736.617.896	0,976

Kab. Sukabumi	2022	4.107.551.175.294	4.057.575.003.077	0,988
Kab. Sukabumi	2023	4.355.471.581.814	4.369.157.230.612	1,003
Kab. Sukabumi	2024	4.651.046.400.630	4.570.489.026.462	0,983
Kab. Sumbawa	2022	1.684.800.208.490	1.676.662.543.593	0,995
Kab. Sumbawa	2023	1.907.954.680.086	1.918.003.210.864	1,005
Kab. Sumbawa	2024	2.109.335.628.713	2.040.862.327.564	0,968
Kab. Sumedang	2022	2.922.987.303.057	2.933.463.701.910	1,004
Kab. Sumedang	2023	2.845.322.438.547	2.919.935.326.859	1,026
Kab. Sumedang	2024	3.057.028.925.544	3.083.037.976.547	1,009
Kab. Tabanan	2022	1.784.234.201.540	1.785.089.226.451	1,000
Kab. Tabanan	2023	2.011.033.724.131	2.018.741.872.405	1,004
Kab. Tabanan	2024	2.245.674.448.462	2.160.699.587.623	0,962
Kab. Tasikmalaya	2022	3.150.502.793.418	3.171.349.572.665	1,007
Kab. Tasikmalaya	2023	3.346.130.492.143	3.301.758.962.152	0,987
Kab. Tasikmalaya	2024	3.566.540.362.911	3.741.552.000.360	1,049
Kab. Teluk Wondama	2022	980.468.715.807	999.599.975.531	1,020
Kab. Teluk Wondama	2023	1.187.027.015.468	1.171.710.927.676	0,987
Kab. Teluk Wondama	2024	1.092.600.499.860	1.098.275.378.085	1,005
Kota Ambon	2023	1.204.536.104.743	1.190.899.358.284	0,989
Kota Ambon	2024	1.195.323.444.524	1.213.459.476.388	1,015
Kota Bandung	2022	6.415.745.415.059	6.473.479.211.554	1,009
Kota Bandung	2023	6.905.926.043.905	6.746.043.396.778	0,977
Kota Bandung	2024	7.153.103.797.810	7.067.211.608.536	0,988
Kota Banjar	2022	757.281.900.363	790.679.980.804	1,044

Kota Banjar	2023	764.722.202.798	767.867.437.284	1,004
Kota Banjar	2024	776.161.971.550	786.164.478.466	1,013
Kota Bau-bau	2023	913.124.986.940	942.634.572.767	1,032
Kota Bau-bau	2024	945.690.257.721	919.859.171.468	0,973
Kota Bekasi	2022	5.862.702.649.409	5.719.816.481.557	0,976
Kota Bekasi	2023	6.142.085.380.266	6.411.452.063.828	1,044
Kota Bekasi	2024	6.297.610.287.186	6.487.592.585.943	1,030
Kota Bima	2023	773.124.623.905	829.916.997.925	1,073
Kota Bima	2024	899.569.714.006	893.324.937.238	0,993
Kota Bogor	2022	2.787.105.058.803	2.986.354.433.003	1,071
Kota Bogor	2023	2.967.475.570.540	3.029.015.680.109	1,021
Kota Bogor	2024	3.170.497.628.555	3.178.466.734.133	1,003
Kota Cimahi	2022	1.331.038.275.112	1.377.664.990.208	1,035
Kota Cimahi	2023	1.398.833.022.715	1.502.279.788.248	1,074
Kota Cimahi	2024	1.568.100.547.433	1.559.857.769.684	0,995
Kota Cirebon	2022	1.477.506.731.354	1.433.814.101.322	0,970
Kota Cirebon	2023	1.457.195.241.975	1.444.792.084.073	0,991
Kota Cirebon	2024	1.554.932.852.016	1.581.403.559.072	1,017
Kota Denpasar	2022	2.106.397.941.465	2.024.804.783.849	0,961
Kota Denpasar	2023	2.489.157.399.308	2.323.885.541.298	0,934
Kota Dumai	2023	1.911.067.514.158	1.947.924.616.479	1,019
Kota Dumai	2024	1.792.200.446.556	1.809.083.667.573	1,009
Kota Kendari	2023	1.459.120.711.168	1.547.699.937.774	1,061
Kota Kendari	2024	1.533.910.811.939	1.557.273.717.637	1,015

Kota Pekanbaru	2022	2.479.247.340.046	2.492.666.952.346	1,005
Kota Pekanbaru	2023	2.753.144.818.421	2.824.292.669.745	1,026
Kota Pekanbaru	2024	2.780.228.449.089	2.761.174.961.016	0,993
Kota Pontianak	2022	1.704.897.506.230	1.668.494.785.328	0,979
Kota Pontianak	2023	1.816.677.082.052	1.705.137.526.178	0,939
Kota Pontianak	2024	1.937.581.220.070	1.928.760.907.470	0,995
Kota Singkawang	2023	983.286.192.730	1.012.357.695.174	1,030
Kota Singkawang	2024	1.012.784.045.556	999.648.757.258	0,987
Kota Sukabumi	2022	1.212.367.670.664	1.255.817.492.652	1,036
Kota Sukabumi	2023	1.256.510.130.005	1.277.025.782.658	1,016
Kota Sukabumi	2024	1.331.427.011.097	1.330.988.720.211	1,000
Kota Tasikmalaya	2022	1.958.781.356.942	1.924.719.704.939	0,983
Kota Tasikmalaya	2023	1.698.776.143.137	1.716.186.584.366	1,010
Kota Tasikmalaya	2024	1.792.498.534.060	1.790.597.242.392	0,999
Kota Tual	2022	631.578.972.138	623.453.729.387	0,987
Kota Tual	2023	527.946.238.311	510.058.049.759	0,966
Kota Tual	2024	567.112.183.546	610.339.812.699	1,076
Kota Yogyakarta	2022	1.889.922.124.720	1.826.804.253.747	0,967
Kota Yogyakarta	2023	2.000.846.169.484	1.972.232.487.692	0,986
Kota Yogyakarta	2024	2.081.580.284.914	2.091.367.191.909	1,005

Lampiran 3 Perhitungan TKD

LOKASI	TAHUN	PAD	PENDAPATAN DAERAH	TKD
Kab. Badung	2023	6.308.865.160.075	7.217.252.183.431	0,874137
Kab. Badung	2024	7.506.995.595.563	8.620.177.970.049	0,870863
Kab. Bandung	2022	1.237.273.508.423	5.910.228.108.514	0,209344
Kab. Bandung	2023	1.296.821.569.077	6.361.706.741.689	0,203848
Kab. Bandung	2024	1.385.838.716.205	6.934.981.898.275	0,199833
Kab. Bangli	2023	219.918.641.354	1.264.668.588.709	0,173894
Kab. Bangli	2024	223.329.854.770	1.332.186.446.451	0,167642
Kab. Bantul	2022	540.572.423.373	2.260.577.439.196	0,23913
Kab. Bantul	2024	638.567.864.260	2.609.413.354.405	0,244717
Kab. Bantul	2023	587.435.038.673	2.416.084.417.355	0,243135
Kab. Bekasi	2022	2.537.931.758.052	5.896.615.937.108	0,430405
Kab. Bekasi	2023	2.867.796.340.052	6.596.894.786.390	0,434719
Kab. Bekasi	2024	3.081.321.345.820	7.186.021.408.378	0,428794
Kab. Bengkayang	2023	82.011.588.604	1.250.790.429.072	0,065568
Kab. Bengkayang	2024	84.083.057.631	1.188.484.024.754	0,070748
Kab. Bima	2022	121.314.712.268	1.776.019.897.969	0,068307
Kab. Bima	2023	154.644.294.788	1.852.652.619.631	0,083472
Kab. Bima	2024	240.145.699.064	2.090.724.830.810	0,114862
Kab. Bogor	2022	3.682.559.741.928	9.029.607.236.616	0,407832
Kab. Bogor	2023	3.968.039.031.051	9.739.562.713.545	0,407414
Kab. Bogor	2024	4.605.172.894.268	10.923.025.118.687	0,421602
Kab. Buleleng	2022	410.564.891.258	2.078.952.625.994	0,197486

Kab. Buleleng	2023	460.500.058.609	2.216.868.306.840	0,207725
Kab. Buleleng	2024	544.579.917.328	2.534.670.913.550	0,214852
Kab. Buru	2022	31.188.636.931	833.550.859.298	0,037417
Kab. Buru	2023	30.699.986.822	777.460.897.778	0,039487
Kab. Buru	2024	36.929.372.513	829.493.912.404	0,04452
Kab. Buru Selatan	2022	15.519.227.149	641.418.118.955	0,024195
Kab. Buru Selatan	2023	19.115.762.110	665.349.206.137	0,02873
Kab. Buru Selatan	2024	15.986.558.111	707.395.236.213	0,022599
Kab. Buton Selatan	2023	19.043.514.083	581.468.612.731	0,032751
Kab. Buton Selatan	2024	27.591.475.429	671.635.987.613	0,041081
Kab. Buton Tengah	2023	18.889.112.531	711.590.421.402	0,026545
Kab. Buton Tengah	2022	18.698.683.865	674.033.441.451	0,027741
Kab. Buton Tengah	2024	30.261.809.993	738.169.617.521	0,040996
Kab. Buton Utara	2024	32.852.123.694	785.301.868.130	0,041834
Kab. Ciamis	2022	302.210.305.608	2.684.529.798.485	0,112575
Kab. Ciamis	2023	274.116.416.445	2.786.680.325.550	0,098367
Kab. Ciamis	2024	311.975.555.092	2.820.124.311.622	0,110625
Kab. Cianjur	2022	556.036.596.089	3.978.964.224.762	0,139744
Kab. Cianjur	2023	649.199.220.654	4.277.102.593.941	0,151785
Kab. Cianjur	2024	835.503.226.923	4.604.513.607.952	0,181453
Kab. Cirebon	2022	800.175.663.909	4.032.056.972.706	0,198453
Kab. Cirebon	2023	744.524.538.981	4.017.267.994.688	0,185331
Kab. Cirebon	2024	772.488.538.477	4.464.635.080.497	0,173024
Kab. Dompu	2022	124.947.081.483	1.190.229.548.801	0,104977

Kab. Dompu	2023	112.761.124.346	1.146.064.800.836	0,09839
Kab. Dompu	2024	211.361.862.542	1.312.172.188.618	0,161078
Kab. Fak Fak	2022	31.592.727.526	1.305.849.555.818	0,024193
Kab. Fak Fak	2023	22.589.634.459	1.430.219.550.382	0,015795
Kab. Fak Fak	2024	22.118.794.393	1.531.522.264.918	0,014442
Kab. Garut	2022	486.038.766.410	4.626.954.746.948	0,105045
Kab. Garut	2023	535.625.900.301	4.780.438.457.960	0,112045
Kab. Garut	2024	538.184.227.757	4.968.925.212.933	0,10831
Kab. Gianyar	2022	857.553.634.531	2.093.010.626.624	0,409723
Kab. Gianyar	2023	1.479.338.179.814	2.528.821.329.163	0,584991
Kab. Indragiri Hilir	2022	167.870.576.268	1.895.777.996.320	0,08855
Kab. Indragiri Hilir	2023	193.184.733.398	2.097.081.414.493	0,092121
Kab. Indragiri Hilir	2024	206.669.519.331	2.057.359.021.736	0,100454
Kab. Indragiri Hulu	2022	120.209.746.158	1.487.376.159.148	0,08082
Kab. Indragiri Hulu	2023	111.774.962.810	1.607.409.344.684	0,069537
Kab. Indramayu	2022	563.304.792.987	3.293.006.392.610	0,171061
Kab. Indramayu	2023	629.731.481.470	3.536.349.758.981	0,178074
Kab. Indramayu	2024	651.640.472.530	3.650.581.421.499	0,178503
Kab. Jembrana	2022	175.992.613.180	1.095.691.565.639	0,160622
Kab. Jembrana	2023	221.557.656.589	1.120.324.778.259	0,197762
Kab. Jembrana	2024	184.575.515.567	1.237.091.971.583	0,149201
Kab. Kaimana	2022	26.086.768.017	1.101.428.459.609	0,023684
Kab. Kaimana	2023	29.176.012.167	1.268.311.578.689	0,023004
Kab. Kampar	2022	260.421.043.093	2.427.503.585.553	0,107279

Kab. Kampar	2023	298.626.546.420	2.734.805.625.683	0,109195
Kab. Kampar	2024	442.120.329.338	3.009.580.749.240	0,146904
Kab. Kapuas Hulu	2022	70.668.853.866	1.566.982.253.919	0,045099
Kab. Kapuas Hulu	2023	73.407.843.893	1.723.722.235.977	0,042587
Kab. Kapuas Hulu	2024	92.317.977.162	1.829.271.556.884	0,050467
Kab. Karangasem	2022	301.332.231.355	1.577.410.438.959	0,19103
Kab. Karangasem	2023	381.240.518.354	1.641.545.932.774	0,232245
Kab. Karangasem	2024	434.377.395.084	1.840.886.441.360	0,235961
Kab. Karawang	2022	1.561.872.512.056	4.802.598.262.500	0,325214
Kab. Karawang	2023	1.696.143.476.543	5.196.315.407.231	0,326413
Kab. Karawang	2024	1.826.280.795.928	5.686.622.840.656	0,321154
Kab. Kayong Utara	2022	39.750.935.658	771.708.567.581	0,05151
Kab. Kayong Utara	2023	49.623.846.691	822.442.626.546	0,060337
Kab. Kayong Utara	2024	45.321.130.302	786.216.294.748	0,057645
Kab. Kepulauan Aru	2022	21.675.156.770	754.113.297.342	0,028743
Kab. Kepulauan Aru	2023	31.955.275.190	912.676.924.898	0,035013
Kab. Kepulauan Aru	2024	30.199.369.289	926.497.807.572	0,032595
Kab. Kepulauan Meranti	2022	81.306.981.527	1.065.125.835.211	0,076336
Kab. Kepulauan Meranti	2023	144.713.425.208	1.180.122.990.490	0,122626
Kab. Kepulauan Meranti	2024	97.941.937.585	1.139.908.805.098	0,085921
Kab. Kepulauan Tanimbar	2023	23.401.832.222	819.044.559.604	0,028572
Kab. Kepulauan Tanimbar	2024	44.050.077.171	872.277.367.375	0,0505

Kab. Klungkung	2022	309.462.458.435	1.147.881.200.993	0,269594
Kab. Klungkung	2023	350.536.512.386	1.370.586.084.746	0,255757
Kab. Klungkung	2024	419.878.961.801	1.475.431.453.902	0,28458
Kab. Kolaka	2022	170.304.412.483	1.304.869.645.917	0,130515
Kab. Kolaka	2023	170.659.504.192	1.731.102.864.015	0,098584
Kab. Kolaka	2024	189.281.002.128	1.783.407.793.794	0,106134
Kab. Kolaka Timur	2023	24.655.446.121	793.327.473.254	0,031079
Kab. Kolaka Timur	2024	42.523.052.735	876.989.582.253	0,048488
Kab. Kolaka Utara	2022	55.749.528.688	936.628.940.493	0,059521
Kab. Kolaka Utara	2023	59.249.520.938	970.266.672.561	0,061065
Kab. Kolaka Utara	2024	80.182.248.120	1.142.586.382.291	0,070176
Kab. Konawe	2022	194.545.331.488	1.490.004.684.542	0,130567
Kab. Konawe	2023	168.538.901.658	1.652.476.720.349	0,101992
Kab. Konawe	2024	271.879.256.586	1.842.636.724.950	0,147549
Kab. Konawe Kepulauan	2022	10.718.913.817	546.306.548.600	0,019621
Kab. Konawe Kepulauan	2024	19.194.265.796	643.585.044.876	0,029824
Kab. Konawe Selatan	2022	86.984.737.136	1.551.853.291.167	0,056052
Kab. Konawe Selatan	2024	147.919.770.815	1.742.118.838.661	0,084908
Kab. Kuantan Singingi	2022	76.851.089.348	1.313.503.378.952	0,058508
Kab. Kuantan Singingi	2023	204.938.152.584	1.544.473.160.461	0,132691
Kab. Kubu Raya	2022	165.145.769.699	1.557.558.858.427	0,106029
Kab. Kubu Raya	2024	253.234.841.011	1.790.615.563.779	0,141423
Kab. Kulon Progo	2022	308.159.760.929	1.530.236.282.275	0,201381
Kab. Kulon Progo	2023	324.053.666.353	1.695.996.921.752	0,19107

Kab. Kulon Progo	2024	358.092.879.848	1.755.011.581.883	0,20404
Kab. Kuningan	2023	305.989.478.298	2.842.021.968.214	0,107666
Kab. Kuningan	2024	313.331.431.619	2.858.286.478.898	0,109622
Kab. Landak	2022	73.275.180.943	1.331.489.541.094	0,055032
Kab. Landak	2023	62.613.089.144	1.338.510.857.505	0,046778
Kab. Landak	2024	89.451.838.857	1.408.063.281.571	0,063528
Kab. Lombok Barat	2022	268.803.499.789	1.732.193.283.374	0,155181
Kab. Lombok Barat	2023	341.535.799.392	1.780.213.408.241	0,191851
Kab. Lombok Tengah	2022	282.999.633.177	2.165.880.757.454	0,130663
Kab. Lombok Tengah	2023	262.570.829.274	2.278.299.769.298	0,115249
Kab. Lombok Tengah	2024	440.108.844.119	2.729.660.115.585	0,161232
Kab. Lombok Timur	2023	386.034.914.322	2.853.354.967.184	0,135292
Kab. Lombok Timur	2024	486.975.216.085	3.316.043.939.538	0,146854
Kab. Lombok Utara	2022	146.436.634.596	912.898.166.331	0,160409
Kab. Lombok Utara	2023	206.015.318.985	1.039.089.731.592	0,198265
Kab. Majalengka	2022	480.154.261.787	3.005.180.448.508	0,159776
Kab. Majalengka	2023	529.336.132.216	3.023.014.286.534	0,175102
Kab. Majalengka	2024	530.215.308.791	3.137.439.996.281	0,168996
Kab. Maluku Barat Daya	2023	47.855.252.617	911.929.404.695	0,052477
Kab. Maluku Barat Daya	2024	30.260.484.491	920.441.273.222	0,032876
Kab. Maluku Tengah	2022	80.918.459.234	1.537.672.338.670	0,052624
Kab. Maluku Tengah	2023	82.384.912.313	1.640.836.237.786	0,050209
Kab. Maluku Tengah	2024	70.320.356.088	1.689.407.779.549	0,041624
Kab. Maluku Tenggara	2022	48.953.613.547	893.152.891.161	0,05481

Kab. Maluku Tenggara	2024	51.049.555.274	900.784.547.799	0,056672
Kab. Manokwari	2022	88.124.645.163	1.358.552.655.750	0,064867
Kab. Manokwari	2023	97.543.255.380	1.594.790.654.069	0,061164
Kab. Manokwari	2024	114.462.616.751	1.559.787.897.881	0,073383
Kab. Manokwari Selatan	2022	7.435.550.731	698.585.709.052	0,010644
Kab. Manokwari Selatan	2023	10.101.297.517	866.071.329.616	0,011663
Kab. Manokwari Selatan	2024	8.402.438.106	851.580.445.192	0,009867
Kab. Melawi	2022	43.673.906.225	1.034.736.581.819	0,042208
Kab. Melawi	2023	38.091.491.806	1.152.062.921.827	0,033064
Kab. Melawi	2024	54.592.105.550	1.109.632.777.548	0,049198
Kab. Mempawah	2022	154.466.054.039	1.049.304.823.149	0,147208
Kab. Mempawah	2023	148.988.046.415	1.072.437.997.870	0,138925
Kab. Mempawah	2024	147.446.161.321	1.196.507.616.280	0,12323
Kab. Muna Barat	2024	30.309.713.628	711.049.521.710	0,042627
Kab. Pangandaran	2022	256.749.511.702	1.493.615.029.265	0,171898
Kab. Pangandaran	2023	242.766.077.875	1.334.214.286.772	0,181954
Kab. Pangandaran	2024	240.125.736.186	1.433.017.885.265	0,167566
Kab. Pegunungan Arfak	2022	3.254.425.181	919.161.274.048	0,003541
Kab. Pegunungan Arfak	2023	6.484.442.269	1.102.528.726.975	0,005881
Kab. Purwakarta	2022	561.927.757.652	2.256.119.657.743	0,249068
Kab. Purwakarta	2023	554.854.784.899	2.371.774.256.872	0,233941
Kab. Purwakarta	2024	622.928.999.490	2.548.811.674.513	0,2444

Kab. Rokan Hilir	2023	148.699.501.670	2.161.915.220.836	0,068781
Kab. Rokan Hilir	2024	454.202.581.014	2.544.339.739.897	0,178515
Kab. Rokan Hulu	2022	108.322.526.723	1.577.310.409.474	0,068675
Kab. Rokan Hulu	2023	148.540.528.998	1.845.813.897.701	0,080474
Kab. Rokan Hulu	2024	161.501.247.627	1.787.833.016.749	0,090334
Kab. Sambas	2022	167.639.410.304	1.706.793.890.995	0,098219
Kab. Sambas	2023	230.889.069.498	1.867.559.599.104	0,123631
Kab. Sambas	2024	229.120.841.940	2.102.272.191.828	0,108987
Kab. Sanggau	2022	147.327.186.569	1.590.132.140.160	0,092651
Kab. Sanggau	2023	159.171.289.955	1.888.904.848.548	0,084266
Kab. Sanggau	2024	176.129.863.987	1.807.274.011.570	0,097456
Kab. Sekadau	2022	49.957.906.238	852.887.481.102	0,058575
Kab. Sekadau	2023	60.051.351.166	921.951.226.101	0,065135
Kab. Sekadau	2024	58.799.759.009	950.227.128.977	0,06188
Kab. Seram Bagian Barat	2022	21.217.009.488	905.593.821.522	0,023429
Kab. Seram Bagian Barat	2024	29.690.134.728	967.411.067.004	0,03069
Kab. Seram Bagian Timur	2022	15.540.924.456	950.159.289.436	0,016356
Kab. Seram Bagian Timur	2023	17.277.189.313	1.005.658.326.265	0,01718
Kab. Seram Bagian Timur	2024	38.213.729.902	990.361.660.942	0,038586
Kab. Siak	2023	762.804.217.825	2.731.666.927.765	0,279245
Kab. Sleman	2022	1.061.064.803.656	3.005.980.155.063	0,352985
Kab. Sleman	2023	1.130.157.860.241	3.083.612.992.325	0,366504
Kab. Sleman	2024	1.184.122.706.290	3.238.107.257.278	0,365684
Kab. Subang	2022	312.782.125.345	2.687.865.111.928	0,116368

Kab. Subang	2023	594.665.800.316	3.286.595.470.769	0,180937
Kab. Subang	2024	718.151.128.241	3.696.270.083.723	0,194291
Kab. Sukabumi	2022	712.538.704.914	4.107.551.175.294	0,17347
Kab. Sukabumi	2023	754.662.081.271	4.355.471.581.814	0,173268
Kab. Sukabumi	2024	773.390.090.236	4.651.046.400.630	0,166283
Kab. Sumbawa	2022	172.069.779.307	1.684.800.208.490	0,102131
Kab. Sumbawa	2023	179.881.179.446	1.907.954.680.086	0,09428
Kab. Sumbawa	2024	275.567.025.592	2.109.335.628.713	0,130642
Kab. Sumedang	2022	542.755.490.495	2.922.987.303.057	0,185685
Kab. Sumedang	2023	518.684.991.990	2.845.322.438.547	0,182294
Kab. Sumedang	2024	566.234.387.379	3.057.028.925.544	0,185224
Kab. Tabanan	2022	436.408.393.061	1.784.234.201.540	0,244591
Kab. Tabanan	2023	510.606.715.918	2.011.033.724.131	0,253903
Kab. Tabanan	2024	577.244.929.475	2.245.674.448.462	0,257047
Kab. Tasikmalaya	2022	305.275.588.113	3.150.502.793.418	0,096897
Kab. Tasikmalaya	2023	317.593.241.698	3.346.130.492.143	0,094914
Kab. Tasikmalaya	2024	358.951.018.709	3.566.540.362.911	0,100644
Kab. Teluk Wondama	2022	26.700.299.405	980.468.715.807	0,027232
Kab. Teluk Wondama	2023	30.609.634.518	1.187.027.015.468	0,025787
Kab. Teluk Wondama	2024	35.321.730.334	1.092.600.499.860	0,032328
Kota Ambon	2023	256.112.861.068	1.204.536.104.743	0,212624
Kota Ambon	2024	194.981.209.080	1.195.323.444.524	0,16312
Kota Bandung	2022	2.754.477.948.218	6.415.745.415.059	0,429331
Kota Bandung	2023	2.934.902.366.198	6.905.926.043.905	0,424983

Kota Bandung	2024	3.091.256.996.423	7.153.103.797.810	0,432156
Kota Banjar	2022	131.126.716.326	757.281.900.363	0,173154
Kota Banjar	2023	132.509.172.286	764.722.202.798	0,173278
Kota Banjar	2024	137.660.594.155	776.161.971.550	0,177361
Kota Bau-bau	2023	101.690.106.338	913.124.986.940	0,111365
Kota Bau-bau	2024	138.378.642.482	945.690.257.721	0,146326
Kota Bekasi	2022	2.598.632.223.398	5.862.702.649.409	0,443248
Kota Bekasi	2023	2.730.403.781.662	6.142.085.380.266	0,44454
Kota Bekasi	2024	2.671.677.896.248	6.297.610.287.186	0,424237
Kota Bima	2023	51.449.182.945	773.124.623.905	0,066547
Kota Bima	2024	141.815.786.456	899.569.714.006	0,157648
Kota Bogor	2022	1.147.623.045.709	2.787.105.058.803	0,411762
Kota Bogor	2023	1.338.618.268.169	2.967.475.570.540	0,451097
Kota Bogor	2024	1.458.619.452.757	3.170.497.628.555	0,46006
Kota Cimahi	2022	394.676.719.571	1.331.038.275.112	0,296518
Kota Cimahi	2023	425.618.305.801	1.398.833.022.715	0,304267
Kota Cimahi	2024	500.746.897.867	1.568.100.547.433	0,319333
Kota Cirebon	2022	540.343.015.082	1.477.506.731.354	0,365713
Kota Cirebon	2023	532.653.850.484	1.457.195.241.975	0,365534
Kota Cirebon	2024	559.128.776.388	1.554.932.852.016	0,359584
Kota Denpasar	2022	888.051.855.597	2.106.397.941.465	0,421597
Kota Denpasar	2023	1.198.372.000.166	2.489.157.399.308	0,481437
Kota Dumai	2023	566.903.618.475	1.911.067.514.158	0,296642
Kota Dumai	2024	606.665.799.255	1.792.200.446.556	0,338503

Kota Kendari	2023	354.707.753.278	1.459.120.711.168	0,243097
Kota Kendari	2024	362.876.714.717	1.533.910.811.939	0,23657
Kota Pekanbaru	2022	799.021.484.426	2.479.247.340.046	0,322284
Kota Pekanbaru	2023	890.286.830.690	2.753.144.818.421	0,323371
Kota Pekanbaru	2024	923.858.966.790	2.780.228.449.089	0,332296
Kota Pontianak	2022	537.797.747.855	1.704.897.506.230	0,315443
Kota Pontianak	2023	574.760.971.716	1.816.677.082.052	0,31638
Kota Pontianak	2024	593.775.839.763	1.937.581.220.070	0,306452
Kota Singkawang	2023	244.316.898.933	983.286.192.730	0,24847
Kota Singkawang	2024	272.080.297.921	1.012.784.045.556	0,268646
Kota Sukabumi	2022	362.743.847.887	1.212.367.670.664	0,299203
Kota Sukabumi	2023	406.550.820.683	1.256.510.130.005	0,323556
Kota Sukabumi	2024	437.033.662.447	1.331.427.011.097	0,328245
Kota Tasikmalaya	2022	341.729.661.505	1.958.781.356.942	0,17446
Kota Tasikmalaya	2023	364.302.263.152	1.698.776.143.137	0,21445
Kota Tasikmalaya	2024	351.779.876.339	1.792.498.534.060	0,196251
Kota Tual	2022	23.668.582.664	631.578.972.138	0,037475
Kota Tual	2023	25.453.943.643	527.946.238.311	0,048213
Kota Tual	2024	29.590.179.395	567.112.183.546	0,052177
Kota Yogyakarta	2022	725.577.542.998	1.889.922.124.720	0,383919
Kota Yogyakarta	2023	805.346.115.793	2.000.846.169.484	0,402503
Kota Yogyakarta	2024	855.100.858.914	2.081.580.284.914	0,410794

LAMPIRAN 4 PERHITUNGAN X2

LOKASI	TAHUN	UMUR PEMDA
Kab. Badung	2023	64
Kab. Badung	2024	65
Kab. Bandung	2022	380
Kab. Bandung	2023	381
Kab. Bandung	2024	382
Kab. Bangli	2023	64
Kab. Bangli	2024	65
Kab. Bantul	2022	190
Kab. Bantul	2024	192
Kab. Bantul	2023	191
Kab. Bekasi	2022	71
Kab. Bekasi	2023	72
Kab. Bekasi	2024	73
Kab. Bengkayang	2023	23
Kab. Bengkayang	2024	24
Kab. Bima	2022	381
Kab. Bima	2023	382
Kab. Bima	2024	383
Kab. Bogor	2022	539
Kab. Bogor	2023	540
Kab. Bogor	2024	541
Kab. Buleleng	2022	63
Kab. Buleleng	2023	64
Kab. Buleleng	2024	65
Kab. Buru	2022	22
Kab. Buru	2023	23
Kab. Buru	2024	24
Kab. Buru Selatan	2022	13
Kab. Buru Selatan	2023	14
Kab. Buru Selatan	2024	15
Kab. Buton Selatan	2023	8
Kab. Buton Selatan	2024	9
Kab. Buton Tengah	2023	8
Kab. Buton Tengah	2022	7
Kab. Buton Tengah	2024	9
Kab. Buton Utara	2024	16
Kab. Ciamis	2022	379
Kab. Ciamis	2023	380

Kab. Ciamis	2024	381
Kab. Cianjur	2022	344
Kab. Cianjur	2023	345
Kab. Cianjur	2024	346
Kab. Cirebon	2022	539
Kab. Cirebon	2023	540
Kab. Cirebon	2024	541
Kab. Dompu	2022	206
Kab. Dompu	2023	207
Kab. Dompu	2024	208
Kab. Fak Fak	2022	52
Kab. Fak Fak	2023	53
Kab. Fak Fak	2024	54
Kab. Garut	2022	106
Kab. Garut	2023	107
Kab. Garut	2024	108
Kab. Gianyar	2022	63
Kab. Gianyar	2023	64
Kab. Indragiri Hilir	2022	56
Kab. Indragiri Hilir	2023	57
Kab. Indragiri Hilir	2024	58
Kab. Indragiri Hulu	2022	65
Kab. Indragiri Hulu	2023	66
Kab. Indramayu	2022	494
Kab. Indramayu	2023	495
Kab. Indramayu	2024	496
Kab. Jembrana	2022	63
Kab. Jembrana	2023	64
Kab. Jembrana	2024	65
Kab. Kaimana	2022	19
Kab. Kaimana	2023	20
Kab. Kampar	2022	71
Kab. Kampar	2023	72
Kab. Kampar	2024	73
Kab. Kapuas Hulu	2022	71
Kab. Kapuas Hulu	2023	72
Kab. Kapuas Hulu	2024	73
Kab. Karangasem	2022	63
Kab. Karangasem	2023	64
Kab. Karangasem	2024	65
Kab. Karawang	2022	388

Kab. Karawang	2023	389
Kab. Karawang	2024	390
Kab. Kayong Utara	2022	14
Kab. Kayong Utara	2023	15
Kab. Kayong Utara	2024	16
Kab. Kepulauan Aru	2022	18
Kab. Kepulauan Aru	2023	19
Kab. Kepulauan Aru	2024	20
Kab. Kepulauan Meranti	2022	13
Kab. Kepulauan Meranti	2023	14
Kab. Kepulauan Meranti	2024	15
Kab. Kepulauan Tanimbar	2023	20
Kab. Kepulauan Tanimbar	2024	21
Kab. Klungkung	2022	63
Kab. Klungkung	2023	64
Kab. Klungkung	2024	65
Kab. Kolaka	2022	61
Kab. Kolaka	2023	62
Kab. Kolaka	2024	63
Kab. Kolaka Timur	2023	9
Kab. Kolaka Timur	2024	10
Kab. Kolaka Utara	2022	18
Kab. Kolaka Utara	2023	19
Kab. Kolaka Utara	2024	20
Kab. Konawe	2022	62
Kab. Konawe	2023	63
Kab. Konawe	2024	64
Kab. Konawe Kepulauan	2022	10
Kab. Konawe Kepulauan	2024	12
Kab. Konawe Selatan	2022	18
Kab. Konawe Selatan	2024	20
Kab. Kuantan Singingi	2022	22
Kab. Kuantan Singingi	2023	23
Kab. Kubu Raya	2022	14
Kab. Kubu Raya	2024	16
Kab. Kulon Progo	2022	70
Kab. Kulon Progo	2023	71
Kab. Kulon Progo	2024	72
Kab. Kuningan	2023	524
Kab. Kuningan	2024	525
Kab. Landak	2022	22

Kab. Landak	2023	23
Kab. Landak	2024	24
Kab. Lombok Barat	2022	62
Kab. Lombok Barat	2023	63
Kab. Lombok Tengah	2022	76
Kab. Lombok Tengah	2023	77
Kab. Lombok Tengah	2024	78
Kab. Lombok Timur	2023	64
Kab. Lombok Timur	2024	65
Kab. Lombok Utara	2022	13
Kab. Lombok Utara	2023	14
Kab. Majalengka	2022	181
Kab. Majalengka	2023	182
Kab. Majalengka	2024	183
Kab. Maluku Barat Daya	2023	14
Kab. Maluku Barat Daya	2024	15
Kab. Maluku Tengah	2022	63
Kab. Maluku Tengah	2023	64
Kab. Maluku Tengah	2024	65
Kab. Maluku Tenggara	2022	69
Kab. Maluku Tenggara	2024	71
Kab. Manokwari	2022	52
Kab. Manokwari	2023	53
Kab. Manokwari	2024	54
Kab. Manokwari Selatan	2022	9
Kab. Manokwari Selatan	2023	10
Kab. Manokwari Selatan	2024	21
Kab. Melawi	2022	18
Kab. Melawi	2023	19
Kab. Melawi	2024	20
Kab. Mempawah	2022	62
Kab. Mempawah	2023	63
Kab. Mempawah	2024	64
Kab. Muna Barat	2024	9
Kab. Pangandaran	2022	9
Kab. Pangandaran	2023	10
Kab. Pangandaran	2024	11
Kab. Pegunungan Arfak	2022	9
Kab. Pegunungan Arfak	2023	10
Kab. Purwakarta	2022	53
Kab. Purwakarta	2023	54

Kab. Purwakarta	2024	55
Kab. Rokan Hilir	2023	23
Kab. Rokan Hilir	2024	24
Kab. Rokan Hulu	2022	22
Kab. Rokan Hulu	2023	23
Kab. Rokan Hulu	2024	24
Kab. Sambas	2022	64
Kab. Sambas	2023	65
Kab. Sambas	2024	66
Kab. Sanggau	2022	62
Kab. Sanggau	2023	63
Kab. Sanggau	2024	64
Kab. Sekadau	2022	18
Kab. Sekadau	2023	19
Kab. Sekadau	2024	20
Kab. Seram Bagian Barat	2022	18
Kab. Seram Bagian Barat	2024	20
Kab. Seram Bagian Timur	2022	18
Kab. Seram Bagian Timur	2023	19
Kab. Seram Bagian Timur	2024	20
Kab. Siak	2023	23
Kab. Sleman	2022	105
Kab. Sleman	2023	106
Kab. Sleman	2024	107
Kab. Subang	2022	73
Kab. Subang	2023	74
Kab. Subang	2024	75
Kab. Sukabumi	2022	151
Kab. Sukabumi	2023	152
Kab. Sukabumi	2024	153
Kab. Sumbawa	2022	62
Kab. Sumbawa	2023	63
Kab. Sumbawa	2024	64
Kab. Sumedang	2022	443
Kab. Sumedang	2023	444
Kab. Sumedang	2024	445
Kab. Tabanan	2022	63
Kab. Tabanan	2023	64
Kab. Tabanan	2024	65
Kab. Tasikmalaya	2022	71
Kab. Tasikmalaya	2023	72

Kab. Tasikmalaya	2024	73
Kab. Teluk Wondama	2022	18
Kab. Teluk Wondama	2023	19
Kab. Teluk Wondama	2024	20
Kota Ambon	2023	447
Kota Ambon	2024	448
Kota Bandung	2022	211
Kota Bandung	2023	212
Kota Bandung	2024	213
Kota Banjar	2022	18
Kota Banjar	2023	19
Kota Banjar	2024	20
Kota Bau-bau	2023	21
Kota Bau-bau	2024	22
Kota Bekasi	2022	24
Kota Bekasi	2023	25
Kota Bekasi	2024	26
Kota Bima	2023	20
Kota Bima	2024	21
Kota Bogor	2022	539
Kota Bogor	2023	540
Kota Bogor	2024	541
Kota Cimahi	2022	20
Kota Cimahi	2023	21
Kota Cimahi	2024	22
Kota Cirebon	2022	71
Kota Cirebon	2023	72
Kota Cirebon	2024	73
Kota Denpasar	2022	29
Kota Denpasar	2023	30
Kota Dumai	2023	23
Kota Dumai	2024	24
Kota Kendari	2023	27
Kota Kendari	2024	28
Kota Pekanbaru	2022	237
Kota Pekanbaru	2023	238
Kota Pekanbaru	2024	239
Kota Pontianak	2022	250
Kota Pontianak	2023	251
Kota Pontianak	2024	252
Kota Singkawang	2023	21

Kota Singkawang	2024	22
Kota Sukabumi	2022	10
Kota Sukabumi	2023	11
Kota Sukabumi	2024	12
Kota Tasikmalaya	2022	20
Kota Tasikmalaya	2023	21
Kota Tasikmalaya	2024	22
Kota Tual	2022	14
Kota Tual	2023	15
Kota Tual	2024	16
Kota Yogyakarta	2022	265
Kota Yogyakarta	2023	266
Kota Yogyakarta	2024	267

Lampiran 5 Perhitungan X3

LOKASI	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN TRANSFER	TKPP
Kab. Badung	2023	7.217.252.183.431	941.562.719.850	0,13046
Kab. Badung	2024	8.620.177.970.049	1.189.929.366.986	0,13804
Kab. Bandung	2022	5.910.228.108.514	4.570.320.294.033	0,77329
Kab. Bandung	2023	6.361.706.741.689	5.002.019.159.788	0,78627
Kab. Bandung	2024	6.934.981.898.275	5.433.350.267.842	0,78347
Kab. Bangli	2023	1.264.668.588.709	1.031.008.420.259	0,81524
Kab. Bangli	2024	1.332.186.446.451	1.112.495.579.567	0,83509
Kab. Bantul	2022	2.260.577.439.196	1.710.782.400.209	0,75679
Kab. Bantul	2023	2.416.084.417.355	1.828.275.239.457	0,75671
Kab. Bantul	2024	2.609.413.354.405	1.968.880.658.299	0,75453
Kab. Bekasi	2022	5.896.615.937.108	3.231.935.195.129	0,5481
Kab. Bekasi	2023	6.596.894.786.390	3.664.575.053.840	0,5555
Kab. Bekasi	2024	7.186.021.408.378	4.094.307.557.637	0,56976
Kab. Bengkulu	2023	1.250.790.429.072	1.148.012.979.515	0,91783
Kab. Bengkulu	2024	1.188.484.024.754	1.104.422.549.684	0,92927
Kab. Bima	2022	1.776.019.897.969	1.585.044.478.341	0,89247
Kab. Bima	2023	1.852.652.619.631	1.694.436.085.915	0,9146
Kab. Bima	2024	2.090.724.830.810	1.842.137.648.427	0,8811
Kab. Bogor	2022	9.029.607.236.616	5.156.086.324.253	0,57102
Kab. Bogor	2023	9.739.562.713.545	5.764.652.378.893	0,59188

Kab. Bogor	2024	10.923.025.118.687	6.222.847.410.116	0,5697
Kab. Buleleng	2022	2.078.952.625.994	1.650.106.278.304	0,79372
Kab. Buleleng	2023	2.216.868.306.840	1.733.435.835.167	0,78193
Kab. Buleleng	2024	2.534.670.913.550	2.057.164.260.147	0,81161
Kab. Buru	2022	833.550.859.298	803.884.784.215	0,96441
Kab. Buru	2023	777.460.897.778	751.509.253.010	0,96662
Kab. Buru	2024	829.493.912.404	781.640.408.597	0,94231
Kab. Buru Selatan	2022	641.418.118.955	620.341.119.566	0,96714
Kab. Buru Selatan	2023	665.349.206.137	656.666.398.997	0,98695
Kab. Buru Selatan	2024	707.395.236.213	673.977.885.254	0,95276
Kab. Buton Selatan	2023	581.468.612.731	553.907.000.488	0,9526
Kab. Buton Selatan	2024	671.635.987.613	636.885.541.614	0,94826
Kab. Buton Tengah	2022	674.033.441.451	648.224.700.978	0,96171
Kab. Buton Tengah	2023	711.590.421.402	664.006.369.923	0,93313
Kab. Buton Tengah	2024	738.169.617.521	705.498.230.250	0,95574
Kab. Buton Utara	2024	785.301.868.130	774.244.817.827	0,98592
Kab. Ciamis	2022	2.684.529.798.485	2.303.863.473.060	0,8582
Kab. Ciamis	2023	2.786.680.325.550	2.498.398.245.872	0,89655
Kab. Ciamis	2024	2.820.124.311.622	2.580.470.147.621	0,91502
Kab. Cianjur	2022	3.978.964.224.762	3.304.052.312.958	0,83038
Kab. Cianjur	2023	4.277.102.593.941	3.484.341.628.154	0,81465
Kab. Cianjur	2024	4.604.513.607.952	3.781.548.890.803	0,82127
Kab. Cirebon	2022	4.032.056.972.706	3.259.111.651.038	0,8083

Kab. Cirebon	2023	4.017.267.994.688	3.223.174.630.178	0,80233
Kab. Cirebon	2024	4.464.635.080.497	3.630.596.601.110	0,81319
Kab. Dompu	2022	1.190.229.548.801	1.054.733.816.965	0,88616
Kab. Dompu	2023	1.146.064.800.836	992.606.724.004	0,8661
Kab. Dompu	2024	1.312.172.188.618	1.111.829.738.860	0,84732
Kab. Fak Fak	2022	1.305.849.555.818	1.254.229.322.877	0,96047
Kab. Fak Fak	2023	1.430.219.550.382	1.350.742.249.967	0,94443
Kab. Fak Fak	2024	1.531.522.264.918	1.448.467.812.491	0,94577
Kab. Garut	2022	4.626.954.746.948	4.062.605.076.463	0,87803
Kab. Garut	2023	4.780.438.457.960	4.213.526.261.231	0,88141
Kab. Garut	2024	4.968.925.212.933	4.432.927.250.214	0,89213
Kab. Gianyar	2022	2.093.010.626.624	1.228.115.845.384	0,58677
Kab. Gianyar	2023	2.528.821.329.163	1.130.813.033.762	0,44717
Kab. Indragiri Hilir	2022	1.895.777.996.320	1.710.257.161.601	0,90214
Kab. Indragiri Hilir	2023	2.097.081.414.493	1.904.275.749.245	0,90806
Kab. Indragiri Hilir	2024	2.057.359.021.736	1.792.391.753.326	0,87121
Kab. Indragiri Hulu	2022	1.487.376.159.148	1.337.567.632.399	0,89928
Kab. Indragiri Hulu	2023	1.607.409.344.684	1.440.512.032.425	0,89617
Kab. Indramayu	2022	3.293.006.392.610	2.762.865.293.464	0,83901
Kab. Indramayu	2023	3.536.349.758.981	2.859.174.143.634	0,80851
Kab. Indramayu	2024	3.650.581.421.499	2.962.848.387.503	0,81161
Kab. Jembrana	2022	1.095.691.565.639	904.394.775.194	0,82541
Kab. Jembrana	2023	1.120.324.778.259	889.526.670.690	0,79399

Kab. Jembrana	2024	1.237.091.971.583	1.057.045.606.039	0,85446
Kab. Kaimana	2022	1.101.428.459.609	1.079.521.047.547	0,98011
Kab. Kaimana	2023	1.268.311.578.689	1.155.571.362.459	0,91111
Kab. Kampar	2022	2.427.503.585.553	2.145.112.093.445	0,88367
Kab. Kampar	2023	2.734.805.625.683	2.496.303.227.067	0,91279
Kab. Kampar	2024	3.009.580.749.240	2.538.852.224.251	0,84359
Kab. Kapuas Hulu	2022	1.566.982.253.919	1.420.140.346.904	0,90629
Kab. Kapuas Hulu	2023	1.723.722.235.977	1.652.084.339.850	0,95844
Kab. Kapuas Hulu	2024	1.829.271.556.884	1.725.314.054.306	0,94317
Kab. Karangasem	2022	1.577.410.438.959	1.268.774.312.472	0,80434
Kab. Karangasem	2023	1.641.545.932.774	1.289.647.731.165	0,78563
Kab. Karangasem	2024	1.840.886.441.360	1.390.034.943.006	0,75509
Kab. Karawang	2022	4.802.598.262.500	3.176.342.438.852	0,66138
Kab. Karawang	2023	5.196.315.407.231	3.431.023.137.086	0,66028
Kab. Karawang	2024	5.686.622.840.656	3.743.617.548.461	0,65832
Kab. Kayong Utara	2022	771.708.567.581	698.211.043.604	0,90476
Kab. Kayong Utara	2023	822.442.626.546	765.217.068.591	0,93042
Kab. Kayong Utara	2024	786.216.294.748	729.144.853.912	0,92741
Kab. Kepulauan Aru	2022	754.113.297.342	740.803.197.644	0,98235
Kab. Kepulauan Aru	2023	912.676.924.898	883.179.206.685	0,96768
Kab. Kepulauan Aru	2024	926.497.807.572	894.172.299.066	0,96511
Kab. Kepulauan Meranti	2022	1.065.125.835.211	938.003.066.778	0,88065
Kab. Kepulauan Meranti	2023	1.180.122.990.490	1.057.154.174.881	0,8958

Kab. Kepulauan Meranti	2024	1.139.908.805.098	1.052.717.180.596	0,92351
Kab. Kepulauan Tanimbar	2023	819.044.559.604	817.987.992.122	0,99871
Kab. Kepulauan Tanimbar	2024	872.277.367.375	826.229.845.151	0,94721
Kab. Klungkung	2022	1.147.881.200.993	810.610.746.517	0,70618
Kab. Klungkung	2023	1.370.586.084.746	1.029.735.031.331	0,75131
Kab. Klungkung	2024	1.475.431.453.902	1.065.984.471.130	0,72249
Kab. Kolaka	2022	1.304.869.645.917	1.173.743.295.199	0,89951
Kab. Kolaka	2023	1.731.102.864.015	1.522.453.035.815	0,87947
Kab. Kolaka	2024	1.783.407.793.794	1.590.710.581.674	0,89195
Kab. Kolaka Timur	2023	793.327.473.254	749.186.732.642	0,94436
Kab. Kolaka Timur	2024	876.989.582.253	825.317.356.067	0,94108
Kab. Kolaka Utara	2022	936.628.940.493	907.799.501.705	0,96922
Kab. Kolaka Utara	2023	970.266.672.561	878.537.661.337	0,90546
Kab. Kolaka Utara	2024	1.142.586.382.291	1.083.286.149.050	0,9481
Kab. Konawe	2022	1.490.004.684.542	1.297.198.078.363	0,8706
Kab. Konawe	2023	1.652.476.720.349	1.466.754.861.749	0,88761
Kab. Konawe	2024	1.842.636.724.950	1.607.018.766.931	0,87213
Kab. Konawe Kepulauan	2022	546.306.548.600	524.448.823.591	0,95999
Kab. Konawe Kepulauan	2024	643.585.044.876	611.399.356.782	0,94999
Kab. Konawe Selatan	2022	1.551.853.291.167	1.458.276.537.709	0,9397
Kab. Konawe Selatan	2024	1.742.118.838.661	1.561.861.802.424	0,89653
Kab. Kuantan Singingi	2022	1.313.503.378.952	1.257.298.569.366	0,95721
Kab. Kuantan Singingi	2023	1.544.473.160.461	1.343.228.307.653	0,8697

Kab. Kubu Raya	2022	1.557.558.858.427	1.315.576.514.181	0,84464
Kab. Kubu Raya	2024	1.790.615.563.779	1.545.193.794.607	0,86294
Kab. Kulon Progo	2022	1.530.236.282.275	1.217.807.940.523	0,79583
Kab. Kulon Progo	2023	1.695.996.921.752	1.368.075.916.931	0,80665
Kab. Kulon Progo	2024	1.755.011.581.883	1.388.021.109.995	0,79089
Kab. Kuningan	2023	2.842.021.968.214	2.497.256.283.250	0,87869
Kab. Kuningan	2024	2.858.286.478.898	2.497.027.650.830	0,87361
Kab. Landak	2022	1.331.489.541.094	1.225.369.824.669	0,9203
Kab. Landak	2023	1.338.510.857.505	1.243.289.195.102	0,92886
Kab. Landak	2024	1.408.063.281.571	1.322.227.743.926	0,93904
Kab. Lombok Barat	2022	1.732.193.283.374	1.460.065.718.556	0,8429
Kab. Lombok Barat	2023	1.780.213.408.241	1.459.490.160.612	0,81984
Kab. Lombok Tengah	2022	2.165.880.757.454	1.810.416.407.541	0,83588
Kab. Lombok Tengah	2023	2.278.299.769.298	1.989.434.141.549	0,87321
Kab. Lombok Tengah	2024	2.729.660.115.585	2.352.202.714.802	0,86172
Kab. Lombok Timur	2023	2.853.354.967.184	2.548.274.254.093	0,89308
Kab. Lombok Timur	2024	3.316.043.939.538	2.859.723.133.018	0,86239
Kab. Lombok Utara	2022	912.898.166.331	769.180.608.005	0,84257
Kab. Lombok Utara	2023	1.039.089.731.592	803.642.389.311	0,77341
Kab. Majalengka	2022	3.005.180.448.508	2.484.082.158.736	0,8266
Kab. Majalengka	2023	3.023.014.286.534	2.497.826.014.534	0,82627
Kab. Majalengka	2024	3.137.439.996.281	2.591.682.308.928	0,82605
Kab. Maluku Barat Daya	2023	911.929.404.695	836.567.558.691	0,91736

Kab. Maluku Barat Daya	2024	920.441.273.222	863.530.389.298	0,93817
Kab. Maluku Tengah	2022	1.537.672.338.670	1.349.553.504.757	0,87766
Kab. Maluku Tengah	2023	1.640.836.237.786	1.550.376.935.997	0,94487
Kab. Maluku Tengah	2024	1.689.407.779.549	1.603.889.957.748	0,94938
Kab. Maluku Tenggara	2022	893.152.891.161	807.079.747.039	0,90363
Kab. Maluku Tenggara	2024	900.784.547.799	839.080.806.275	0,9315
Kab. Manokwari	2022	1.358.552.655.750	1.240.154.791.802	0,91285
Kab. Manokwari	2023	1.594.790.654.069	1.514.476.996.730	0,94964
Kab. Manokwari	2024	1.559.787.897.881	1.467.916.390.696	0,9411
Kab. Manokwari Selatan	2022	698.585.709.052	688.051.036.559	0,98492
Kab. Manokwari Selatan	2023	866.071.329.616	840.643.475.378	0,97064
Kab. Manokwari Selatan	2024	851.580.445.192	756.203.435.330	0,888
Kab. Melawi	2022	1.034.736.581.819	984.986.446.966	0,95192
Kab. Melawi	2023	1.152.062.921.827	1.127.362.692.783	0,97856
Kab. Melawi	2024	1.109.632.777.548	1.036.729.904.063	0,9343
Kab. Mompawah	2022	1.049.304.823.149	892.748.543.535	0,8508
Kab. Mompawah	2023	1.072.437.997.870	900.129.384.752	0,83933
Kab. Mompawah	2024	1.196.507.616.280	1.001.560.630.359	0,83707
Kab. Muna Barat	2024	711.049.521.710	670.875.223.733	0,9435
Kab. Pangandaran	2022	1.493.615.029.265	1.264.225.633.071	0,84642
Kab. Pangandaran	2023	1.334.214.286.772	1.090.600.100.150	0,81741
Kab. Pangandaran	2024	1.433.017.885.265	1.174.415.477.690	0,81954
Kab. Pegunungan Arfak	2022	919.161.274.048	882.045.541.802	0,95962

Kab. Pegunungan Arfak	2023	1.102.528.726.975	1.069.144.157.122	0,96972
Kab. Purwakarta	2022	2.256.119.657.743	1.705.603.900.057	0,75599
Kab. Purwakarta	2023	2.371.774.256.872	1.815.047.685.556	0,76527
Kab. Purwakarta	2024	2.548.811.674.513	1.927.385.900.150	0,75619
Kab. Rokan Hilir	2023	2.161.915.220.836	2.022.536.546.549	0,93553
Kab. Rokan Hilir	2024	2.544.339.739.897	2.100.428.785.477	0,82553
Kab. Rokan Hulu	2022	1.577.310.409.474	1.363.805.672.448	0,86464
Kab. Rokan Hulu	2023	1.845.813.897.701	1.717.972.827.146	0,93074
Kab. Rokan Hulu	2024	1.787.833.016.749	1.601.719.599.706	0,8959
Kab. Sambas	2022	1.706.793.890.995	1.458.967.418.023	0,8548
Kab. Sambas	2023	1.867.559.599.104	1.598.350.882.893	0,85585
Kab. Sambas	2024	2.102.272.191.828	1.937.685.301.930	0,92171
Kab. Sanggau	2022	1.590.132.140.160	1.407.266.944.041	0,885
Kab. Sanggau	2023	1.888.904.848.548	1.754.735.937.156	0,92897
Kab. Sanggau	2024	1.807.274.011.570	1.604.479.794.732	0,88779
Kab. Sekadau	2022	852.887.481.102	776.468.762.795	0,9104
Kab. Sekadau	2023	921.951.226.101	870.063.811.096	0,94372
Kab. Sekadau	2024	950.227.128.977	854.339.709.392	0,89909
Kab. Seram Bagian Barat	2022	905.593.821.522	848.957.983.924	0,93746
Kab. Seram Bagian Barat	2024	967.411.067.004	910.285.443.497	0,94095
Kab. Seram Bagian Timur	2022	950.159.289.436	887.496.284.298	0,93405
Kab. Seram Bagian Timur	2023	1.005.658.326.265	970.490.454.596	0,96503
Kab. Seram Bagian Timur	2024	990.361.660.942	912.717.306.724	0,9216

Kab. Siak	2023	2.731.666.927.765	2.011.107.825.559	0,73622
Kab. Sleman	2022	3.005.980.155.063	1.926.232.083.364	0,6408
Kab. Sleman	2023	3.083.612.992.325	1.934.072.904.916	0,62721
Kab. Sleman	2024	3.238.107.257.278	2.025.597.994.790	0,62555
Kab. Subang	2022	2.687.865.111.928	2.337.313.744.030	0,86958
Kab. Subang	2023	3.286.595.470.769	2.689.914.063.051	0,81845
Kab. Subang	2024	3.696.270.083.723	3.008.505.109.245	0,81393
Kab. Sukabumi	2022	4.107.551.175.294	3.375.092.649.716	0,82168
Kab. Sukabumi	2023	4.355.471.581.814	3.578.237.678.039	0,82155
Kab. Sukabumi	2024	4.651.046.400.630	3.915.297.370.514	0,84181
Kab. Sumbawa	2022	1.684.800.208.490	1.494.198.760.904	0,88687
Kab. Sumbawa	2023	1.907.954.680.086	1.699.739.585.848	0,89087
Kab. Sumbawa	2024	2.109.335.628.713	1.839.657.068.582	0,87215
Kab. Sumedang	2022	2.922.987.303.057	2.376.534.826.750	0,81305
Kab. Sumedang	2023	2.845.322.438.547	2.295.093.985.381	0,80662
Kab. Sumedang	2024	3.057.028.925.544	2.477.874.795.600	0,81055
Kab. Tabanan	2022	1.784.234.201.540	1.351.218.403.168	0,75731
Kab. Tabanan	2023	2.011.033.724.131	1.500.170.827.190	0,74597
Kab. Tabanan	2024	2.245.674.448.462	1.714.280.503.723	0,76337
Kab. Tasikmalaya	2022	3.150.502.793.418	2.826.284.550.948	0,89709
Kab. Tasikmalaya	2023	3.346.130.492.143	3.048.023.726.598	0,91091
Kab. Tasikmalaya	2024	3.566.540.362.911	3.124.396.354.121	0,87603
Kab. Teluk Wondama	2022	980.468.715.807	939.543.951.609	0,95826

Kab. Teluk Wondama	2023	1.187.027.015.468	1.155.452.096.857	0,9734
Kab. Teluk Wondama	2024	1.092.600.499.860	1.042.417.358.901	0,95407
Kota Ambon	2023	1.204.536.104.743	939.526.116.338	0,77999
Kota Ambon	2024	1.195.323.444.524	981.097.576.796	0,82078
Kota Bandung	2022	6.415.745.415.059	3.629.964.598.386	0,56579
Kota Bandung	2023	6.905.926.043.905	4.050.118.446.969	0,58647
Kota Bandung	2024	7.153.103.797.810	4.105.237.800.601	0,57391
Kota Banjar	2022	757.281.900.363	590.997.940.681	0,78042
Kota Banjar	2023	764.722.202.798	633.151.747.807	0,82795
Kota Banjar	2024	776.161.971.550	635.971.596.249	0,81938
Kota Bau-bau	2023	913.124.986.940	789.323.501.211	0,86442
Kota Bau-bau	2024	945.690.257.721	822.864.007.048	0,87012
Kota Bekasi	2022	5.862.702.649.409	3.345.375.385.806	0,57062
Kota Bekasi	2023	6.142.085.380.266	3.292.034.922.115	0,53598
Kota Bekasi	2024	6.297.610.287.186	3.546.751.137.640	0,56319
Kota Bima	2023	773.124.623.905	687.361.909.375	0,88907
Kota Bima	2024	899.569.714.006	763.311.889.425	0,84853
Kota Bogor	2022	2.787.105.058.803	1.545.366.141.954	0,55447
Kota Bogor	2023	2.967.475.570.540	1.601.042.094.573	0,53953
Kota Bogor	2024	3.170.497.628.555	1.709.944.486.009	0,53933
Kota Cimahi	2022	1.331.038.275.112	917.165.233.848	0,68906
Kota Cimahi	2023	1.398.833.022.715	926.237.285.991	0,66215
Kota Cimahi	2024	1.568.100.547.433	1.075.277.907.386	0,68572

Kota Cirebon	2022	1.477.506.731.354	959.433.771.072	0,64936
Kota Cirebon	2023	1.457.195.241.975	930.681.457.145	0,63868
Kota Cirebon	2024	1.554.932.852.016	980.898.291.037	0,63083
Kota Denpasar	2022	2.106.397.941.465	1.247.535.244.812	0,59226
Kota Denpasar	2023	2.489.157.399.308	1.356.765.023.641	0,54507
Kota Dumai	2023	1.911.067.514.158	1.331.459.847.789	0,69671
Kota Dumai	2024	1.792.200.446.556	1.182.081.648.535	0,65957
Kota Kendari	2023	1.459.120.711.168	1.047.371.437.684	0,71781
Kota Kendari	2024	1.533.910.811.939	1.163.655.420.153	0,75862
Kota Pekanbaru	2022	2.479.247.340.046	1.678.004.184.690	0,67682
Kota Pekanbaru	2023	2.753.144.818.421	1.831.970.093.626	0,66541
Kota Pekanbaru	2024	2.780.228.449.089	1.869.953.852.573	0,67259
Kota Pontianak	2022	1.704.897.506.230	1.180.078.906.887	0,69217
Kota Pontianak	2023	1.816.677.082.052	1.291.784.572.735	0,71107
Kota Pontianak	2024	1.937.581.220.070	1.351.753.538.182	0,69765
Kota Singkawang	2023	983.286.192.730	727.336.796.762	0,7397
Kota Singkawang	2024	1.012.784.045.556	749.966.585.734	0,7405
Kota Sukabumi	2022	1.212.367.670.664	818.627.022.262	0,67523
Kota Sukabumi	2023	1.256.510.130.005	826.683.144.733	0,65792
Kota Sukabumi	2024	1.331.427.011.097	881.378.052.806	0,66198
Kota Tasikmalaya	2022	1.958.781.356.942	1.553.842.487.022	0,79327
Kota Tasikmalaya	2023	1.698.776.143.137	1.330.447.499.782	0,78318
Kota Tasikmalaya	2024	1.792.498.534.060	1.447.048.216.576	0,80728

Kota Tual	2022	631.578.972.138	589.774.759.972	0,93381
Kota Tual	2023	527.946.238.311	497.800.508.103	0,9429
Kota Tual	2024	567.112.183.546	518.499.327.173	0,91428
Kota Yogyakarta	2022	1.889.922.124.720	1.197.038.875.355	0,63338
Kota Yogyakarta	2023	2.000.846.169.484	1.211.272.254.082	0,60538
Kota Yogyakarta	2024	2.081.580.284.914	1.222.116.601.076	0,58711

Lampiran 6 Perhitungan Z

LOKASI	TAHUN	IPM
Kab. Badung	2023	83.08
Kab. Badung	2024	83.87
Kab. Bandung	2022	73.16
Kab. Bandung	2023	73.74
Kab. Bandung	2024	74.27
Kab. Bangli	2023	70.79
Kab. Bangli	2024	71.34
Kab. Bantul	2022	80.69
Kab. Bantul	2024	81.74
Kab. Bantul	2023	81.39
Kab. Bekasi	2022	75.22
Kab. Bekasi	2023	75.76
Kab. Bekasi	2024	76.44
Kab. Bengkayang	2023	69.53
Kab. Bengkayang	2024	70.3
Kab. Bima	2022	67.57
Kab. Bima	2023	68.28
Kab. Bima	2024	68.94
Kab. Bogor	2022	71.2
Kab. Bogor	2023	71.78
Kab. Bogor	2024	72.39
Kab. Buleleng	2022	73.45
Kab. Buleleng	2023	73.97
Kab. Buleleng	2024	74.52
Kab. Buru	2022	69.94
Kab. Buru	2023	70.56
Kab. Buru	2024	71.01
Kab. Buru Selatan	2022	65.37
Kab. Buru Selatan	2023	66.23
Kab. Buru Selatan	2024	67.09
Kab. Buton Selatan	2023	66.15
Kab. Buton Selatan	2024	67
Kab. Buton Tengah	2023	65.83
Kab. Buton Tengah	2022	65.29
Kab. Buton Tengah	2024	66.47
Kab. Buton Utara	2024	70.6
Kab. Ciamis	2022	71.45
Kab. Ciamis	2023	72.05

Kab. Ciamis	2024	72.56
Kab. Cianjur	2022	65.94
Kab. Cianjur	2023	66.55
Kab. Cianjur	2024	67.24
Kab. Cirebon	2022	70.06
Kab. Cirebon	2023	70.95
Kab. Cirebon	2024	71.44
Kab. Dompu	2022	69.15
Kab. Dompu	2023	69.98
Kab. Dompu	2024	70.78
Kab. Fak Fak	2022	69.12
Kab. Fak Fak	2023	69.72
Kab. Fak Fak	2024	70.39
Kab. Garut	2022	67.41
Kab. Garut	2023	68.11
Kab. Garut	2024	68.79
Kab. Gianyar	2022	78.39
Kab. Gianyar	2023	79.24
Kab. Indragiri Hilir	2022	67.37
Kab. Indragiri Hilir	2023	67.98
Kab. Indragiri Hilir	2024	68.38
Kab. Indragiri Hulu	2022	70.46
Kab. Indragiri Hulu	2023	71.04
Kab. Indramayu	2022	68.55
Kab. Indramayu	2023	69.25
Kab. Indramayu	2024	69.83
Kab. Jembrana	2022	73.58
Kab. Jembrana	2023	68.91
Kab. Jembrana	2024	74.6
Kab. Kaimana	2022	66.11
Kab. Kaimana	2023	66.72
Kab. Kampar	2022	73.84
Kab. Kampar	2023	74.24
Kab. Kampar	2024	74.08
Kab. Kapuas Hulu	2022	66.7
Kab. Kapuas Hulu	2023	67.67
Kab. Kapuas Hulu	2024	68.58
Kab. Karangasem	2022	68.28
Kab. Karangasem	2023	68.91
Kab. Karangasem	2024	69.74
Kab. Karawang	2022	71.74

Kab. Karawang	2023	72.35
Kab. Karawang	2024	72.9
Kab. Kayong Utara	2022	63.81
Kab. Kayong Utara	2023	64.79
Kab. Kayong Utara	2024	65.74
Kab. Kepulauan Aru	2022	64.21
Kab. Kepulauan Aru	2023	65.01
Kab. Kepulauan Aru	2024	65.83
Kab. Kepulauan Meranti	2022	66.52
Kab. Kepulauan Meranti	2023	67.28
Kab. Kepulauan Meranti	2024	67.92
Kab. Kepulauan Tanimbar	2023	64.16
Kab. Kepulauan Tanimbar	2024	64.83
Kab. Klungkung	2022	72.55
Kab. Klungkung	2023	73.11
Kab. Klungkung	2024	74.04
Kab. Kolaka	2022	73.98
Kab. Kolaka	2023	74.72
Kab. Kolaka	2024	75.18
Kab. Kolaka Timur	2023	69.57
Kab. Kolaka Timur	2024	70.27
Kab. Kolaka Utara	2022	70.39
Kab. Kolaka Utara	2023	71.04
Kab. Kolaka Utara	2024	71.7
Kab. Konawe	2022	72.04
Kab. Konawe	2023	72.77
Kab. Konawe	2024	73.39
Kab. Konawe Kepulauan	2022	66.69
Kab. Konawe Kepulauan	2024	67.99
Kab. Konawe Selatan	2022	69.36
Kab. Konawe Selatan	2024	71.19
Kab. Kuantan Singingi	2022	71.09
Kab. Kuantan Singingi	2023	71.67
Kab. Kubu Raya	2022	68.91
Kab. Kubu Raya	2024	70.25
Kab. Kulon Progo	2022	75.46
Kab. Kulon Progo	2023	75.79
Kab. Kulon Progo	2024	76.14
Kab. Kuningan	2023	70.72
Kab. Kuningan	2024	71.26
Kab. Landak	2022	67.17

Kab. Landak	2023	68.14
Kab. Landak	2024	69.08
Kab. Lombok Barat	2022	69.41
Kab. Lombok Barat	2023	70.15
Kab. Lombok Tengah	2022	67.57
Kab. Lombok Tengah	2023	68.4
Kab. Lombok Tengah	2024	69.17
Kab. Lombok Timur	2023	68.41
Kab. Lombok Timur	2024	69.23
Kab. Lombok Utara	2022	65.7
Kab. Lombok Utara	2023	66.62
Kab. Majalengka	2022	68.56
Kab. Majalengka	2023	69.13
Kab. Majalengka	2024	69.74
Kab. Maluku Barat Daya	2023	63.93
Kab. Maluku Barat Daya	2024	64.86
Kab. Maluku Tengah	2022	71.81
Kab. Maluku Tengah	2023	72.45
Kab. Maluku Tengah	2024	73.21
Kab. Maluku Tenggara	2022	66.88
Kab. Maluku Tenggara	2024	68.24
Kab. Manokwari	2022	72.6
Kab. Manokwari	2023	73.21
Kab. Manokwari	2024	73.83
Kab. Manokwari Selatan	2022	60.68
Kab. Manokwari Selatan	2023	61.55
Kab. Manokwari Selatan	2024	62.45
Kab. Melawi	2022	66.81
Kab. Melawi	2023	67.76
Kab. Melawi	2024	68.66
Kab. Mempawah	2022	66.94
Kab. Mempawah	2023	67.92
Kab. Mempawah	2024	68.56
Kab. Muna Barat	2024	68.06
Kab. Pangandaran	2022	69.03
Kab. Pangandaran	2023	69.38
Kab. Pangandaran	2024	69.85
Kab. Pegunungan Arfak	2022	57.01
Kab. Pegunungan Arfak	2023	57.82
Kab. Purwakarta	2022	71.56
Kab. Purwakarta	2023	72.09

Kab. Purwakarta	2024	72.65
Kab. Rokan Hilir	2023	70.78
Kab. Rokan Hilir	2024	71.2
Kab. Rokan Hulu	2022	70.31
Kab. Rokan Hulu	2023	71.02
Kab. Rokan Hulu	2024	71.82
Kab. Sambas	2022	67.95
Kab. Sambas	2023	68.69
Kab. Sambas	2024	69.31
Kab. Sanggau	2022	66.91
Kab. Sanggau	2023	67.77
Kab. Sanggau	2024	68.43
Kab. Sekadau	2022	65.58
Kab. Sekadau	2023	66.33
Kab. Sekadau	2024	67.25
Kab. Seram Bagian Barat	2022	66.67
Kab. Seram Bagian Barat	2024	68.39
Kab. Seram Bagian Timur	2022	65.05
Kab. Seram Bagian Timur	2023	65.82
Kab. Seram Bagian Timur	2024	66.24
Kab. Siak	2023	74.98
Kab. Sleman	2022	84.31
Kab. Sleman	2023	84.77
Kab. Sleman	2024	85.61
Kab. Subang	2022	69.87
Kab. Subang	2023	70.7
Kab. Subang	2024	71.36
Kab. Sukabumi	2022	67.64
Kab. Sukabumi	2023	68.49
Kab. Sukabumi	2024	68.97
Kab. Sumbawa	2022	68.89
Kab. Sumbawa	2023	69.87
Kab. Sumbawa	2024	70.55
Kab. Sumedang	2022	72.69
Kab. Sumedang	2023	73.18
Kab. Sumedang	2024	73.73
Kab. Tabanan	2022	76.75
Kab. Tabanan	2023	77.43
Kab. Tabanan	2024	78.42
Kab. Tasikmalaya	2022	66.84
Kab. Tasikmalaya	2023	67.76

Kab. Tasikmalaya	2024	68.36
Kab. Teluk Wondama	2022	60.87
Kab. Teluk Wondama	2023	61.67
Kab. Teluk Wondama	2024	62.36
Kota Ambon	2023	82.06
Kota Ambon	2024	82.56
Kota Bandung	2022	73.16
Kota Bandung	2023	83.04
Kota Bandung	2024	83.52
Kota Banjar	2022	72.55
Kota Banjar	2023	73.08
Kota Banjar	2024	73.64
Kota Bau-bau	2023	77.52
Kota Bau-bau	2024	78.13
Kota Bekasi	2022	82.46
Kota Bekasi	2023	83.03
Kota Bekasi	2024	83.54
Kota Bima	2023	77.36
Kota Bima	2024	78.04
Kota Bogor	2022	77.17
Kota Bogor	2023	77.85
Kota Bogor	2024	78.52
Kota Cimahi	2022	78.77
Kota Cimahi	2023	79.46
Kota Cimahi	2024	80.08
Kota Cirebon	2022	75.89
Kota Cirebon	2023	76.46
Kota Cirebon	2024	77.08
Kota Denpasar	2022	84.37
Kota Denpasar	2023	84.73
Kota Dumai	2023	75.66
Kota Dumai	2024	76.19
Kota Kendari	2023	84.85
Kota Kendari	2024	85.33
Kota Pekanbaru	2022	82.06
Kota Pekanbaru	2023	82.38
Kota Pekanbaru	2024	82.89
Kota Pontianak	2022	80.48
Kota Pontianak	2023	81.03
Kota Pontianak	2024	81.57
Kota Singkawang	2023	73.39

Kota Singkawang	2024	73.87
Kota Sukabumi	2022	75.4
Kota Sukabumi	2023	76.32
Kota Sukabumi	2024	76.85
Kota Tasikmalaya	2022	73.83
Kota Tasikmalaya	2023	74.47
Kota Tasikmalaya	2024	75.04
Kota Tual	2022	68.6
Kota Tual	2023	69.43
Kota Tual	2024	70.21
Kota Yogyakarta	2022	87.69
Kota Yogyakarta	2023	88.28
Kota Yogyakarta	2024	88.77

LAMPIRAN 7 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	294	.75	1.38	1.0081	.05723
TKD	294	.00	.87	.1640	.14231
UPD	294	7	78	44.82	25.543
TKPP	294	.13	1.00	.8268	.14069
Valid N (listwise)	294				

LAMPIRAN 8 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardiz ed Residual
N			256
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.02870835
Most Extreme Differences	Absolute		.045
	Positive		.023
	Negative		-.045
Test Statistic			.045
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2- tailed) ^e	Sig.		.230
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.219
		Upper Bound	.241

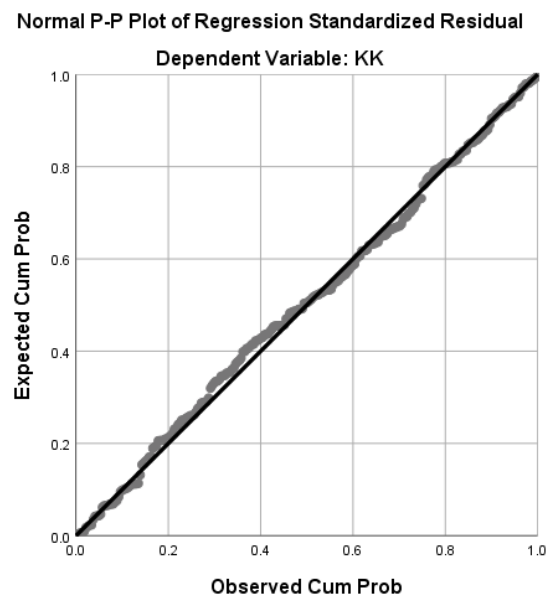
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2048628469.



b. Uji Heteroskedatitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.015	.012		1.239	.216
	TKD	.008	.009	.075	.907	.365
	UPD	-9.933E-5	.000	-.120	-1.780	.076
	TKPP	.013	.012	.097	1.106	.270

a. Dependent Variable: ABSRES1

c. Uji Multikolineritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.078	.019		55.595	.000		
	TKD	-.053	.014	-.309	-3.796	.000	.561	1.782
	UPD	.000	.000	-.089	-1.349	.179	.849	1.178
	TKPP	-.070	.019	-.318	-3.687	.000	.500	2.001

a. Dependent Variable: KK

e. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.253 ^a	.064	.053	.02888	2.048

a. Predictors: (Constant), TKPP, UPD, TKD

b. Dependent Variable: KK

LAMPIRAN 9 Analisis Regresi

a. *Moderating Regression Analysis***Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.211	.036		33.249	.000
	TKD	.380	.129	.2198	2.946	.004
	UPD	-.001	.001	-.644	-.844	.399
	TKPP	-.163	.064	-.743	-2.532	.012
	TKDxIPM	-.007	.002	-2.981	-3.417	.001
	UPDxIPM	9.489E-6	.000	.534	.662	.508
	TKPPxIPM	-.001	.001	-.166	-.751	.454

a. Dependent Variable: KK

b. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.391 ^a	.153	.129	.027697	2.019

c. Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.034	7	.005	6.396	.000 ^b
	Residual	.190	248	.001		
	Total	.225	255			

a. Dependent Variable: KK

b. Predictors: (Constant), TKPPxIPM, UPD, IPM, TKD, UPDxIPM, TKPP, TKDxIPM